



Rencana Kerja (Renja)

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini dapat disusun. Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

Sesuai dengan amanah yang termaktub dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Renja PD ini merupakan dokumen untuk memenuhi maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas dan juga sebagai pemenuhan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yang dalam penyusunannya memerhatikan keselarasan dengan program prioritas nasional tahun 2023, prioritas daerah, serta analisis terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2021 dan tahun 2022.

Kami sangat mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyusunan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini. Semoga seluruh daya dan upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, Agustus 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara,



drg. ISMAIL LUBIS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710204 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD.....	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	50
3.3 Tujuan, Sasaran dan Rencana Aksi Pelaksanaan, serta Target KSD	52
3.4 Program dan Kegiatan.....	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
4.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	56
4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	56
BAB V PENUTUP.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021
Tabel 2.4	Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran APBD/P-APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2021
Tabel 2.5	Prevalensi <i>Stunting</i> pada Balita per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
Tabel 2.6	Lokasi Fokus Intervensi <i>Stunting</i> di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
Tabel 2.7	Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota Tahun 2021
Tabel 2.8	10 (Sepuluh) Penyakit Terbesar di FKTP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
Tabel 2.9	10 (Sepuluh) Penyakit Terbesar Rawat Jalan di FKRTL Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
Tabel 2.10	10 (Sepuluh) Penyakit Terbesar di Ruang Rawat Inap FKRTL Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
Tabel 2.11	Lokasi Prioritas Intervensi Penanggulangan Kemiskinan
Tabel 2.12	Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara
Tabel 3.1	Fokus Pembangunan Kesehatan Tahun 2023
Tabel 3.2	Sasaran Pembangunan Kesehatan Tahun 2023
Tabel 3.3	Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2023
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Renja PD
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Rencana Aksi Pelaksanaan, dan Target KSD Bidang Kesehatan
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tabel 4.2	Distribusi Pagu APBN Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023 per Program Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 AKI dan Kasus Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2021
- Gambar 2.2 Kasus Kematian Ibu per Kabupaten/Kota Tahun 2021
- Gambar 2.3 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2021
- Gambar 2.4 AKB dan Kasus Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2021
- Gambar 2.5 Kasus Kematian Bayi per Kabupaten/Kota Tahun 2021
- Gambar 2.6 Penyebab Kematian Bayi Tahun 2021
- Gambar 2.7 Prevalensi *Stunting* pada Balita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2021
- Gambar 2.8 Angka Kesakitan di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2021

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu dilaksanakan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan menuju masyarakat mandiri untuk hidup sehat.

Berbagai upaya pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan mendapatkan tantangan, baik secara lokal, nasional, maupun global, sebagai akibat dari perubahan sosial ekonomi serta perubahan lingkungan strategis. Berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan kesehatan telah berkembang semakin berat dan kompleks dan kadang-kadang tidak terduga. Semakin dirasakan bahwa pembangunan kesehatan tidak dapat mencapai tujuannya bila hanya diselenggarakan oleh sektor kesehatan saja. Keikutsertaan pihak lain (*stakeholders*) secara lintas sektor termasuk swasta dan masyarakat serta seluruh potensi bangsa sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2005 – 2025, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023, serta memperhatikan arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dalam rangka memenuhi tanggung jawab penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan

tuntutan UUD 1945 pasal 34 dan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.

Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah dokumen rencana 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen Renja PD adalah amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2)).

Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 memuat rancangan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja PD ini dirumuskan dengan melakukan telaahan terhadap kebijakan kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024.

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1447);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 20 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
- 21 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
- 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
- 25 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
- 26 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
- 27 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
- 28 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- 29 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023 dimaksudkan untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan arah pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, serta menjadi dasar bagi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023.

b. Tujuan

1. Tersusunnya rencana program/kegiatan/sub kegiatan prioritas pembangunan Kesehatan Sumatera Utara tahun 2023 yang selaras dengan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023.

2. Terwujudnya program dan kegiatan pembangunan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensinya.
3. Terwujudnya pola perencanaan yang konsisten, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil program/kegiatan.
4. Terselenggaranya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Tahun 2023 secara terarah dan terukur dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023 terdiri dari 5 (lima) Bab, di mana masing-masing Bab memuat beberapa Subbab sebagai berikut:

Bab 1 adalah Pendahuluan, memuat *Latar Belakang* yang menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, Renja Kementerian Kesehatan dan Renja PD Kabupaten/Kota, serta keterkaitan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, *Landasan Hukum*, yang menginformasikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, *Maksud dan tujuan*, yang menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD, dan *Sistematika penulisan*, yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab 2 adalah Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang memuat *Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD*, yang berisikan informasi mengenai realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja; implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, *Analisa Kinerja Pelayanan PD*, yang berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD

berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, *Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD*, yang menguraikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis lainnya termasuk koordinasi dan sinergi program antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten/Kota, termasuk dengan Kementerian Kesehatan; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, program nasional/internasional seperti Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan kemiskinan, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti; *Review terhadap RKPD*, yang berisikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Ranwal RKPD misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, serta *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, yang menyajikan penjelasan tentang bagaimana usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut diperoleh, dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Bab 3 adalah Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang memuat *Telaahan terhadap kebijakan Nasional*, yang berisikan penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tugas pokok dan fungsi PD, *Tujuan dan sasaran Renja SKPD*, yang menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD, serta *Program dan kegiatan*, yang berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan bilamana rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Ranwal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab 4 adalah Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan PD serta sumber pembiayaannya.

Bab 5 adalah Penutup yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya merupakan implementasi terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam rangka menilai capaian kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan kepada target kinerja yang telah ditetapkan.

Gambaran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 secara detail dapat dilihat melalui perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan realisasinya, sebagai berikut:

1. *Sasaran Strategis 1* : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk sasaran strategis 1, dimana keduanya mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021

NO	INDIKATOR	Target	Realisasi	%
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	93,49 per 100.000 kelahiran hidup	89,18 per 100.000 kelahiran hidup	104.61%
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	2,4 per 1.000 kelahiran hidup	2,28 per 1.000 kelahiran hidup	105.00%

2. *Sasaran Strategis 2* : Meningkatnya status gizi masyarakat

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja untuk sasaran strategis 2, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021

No.	INDIKATOR	Target	Realisasi	%
1	Prevalensi stunting pada balita	28,50%	25,8%	109.47%

3. *Sasaran Strategis 3* : Menurunnya angka kesakitan.

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja untuk sasaran strategis 3, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021

No.	INDIKATOR	Target	Realisasi	%
1	Angka kesakitan (morbiditas)	12,24%	8,78%	128.27%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 sebesar Rp. 3.870.072.500,00 atau sebesar 72,26% dibandingkan dengan target PAD (Rp. 5.355.524.000,00). PAD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 bersumber *retribusi jasa umum*, yaitu retribusi pelayanan Kesehatan pada UPT. RS Khusus Mata, UPT. RS Khusus Paru, UPT. RS Kusta Lausimomo, UPT. RS Indrapura, dan UPT. Laboratorium Kesehaatan, *retribusi jasa usaha* yang meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah (rumah dinas), serta *retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ villa/mess*.

Realisasi PAD Tahun 2021 menurun dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp. 4.234.465.711,00 (86.97%). Rendahnya PAD diantaranya disebabkan oleh menurunnya kunjungan masyarakat ke fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk kunjungan pasien ke UPT-UPT Dinas Kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan, akibat masih adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Selain itu, kebijakan pembatasan mobilitas dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pengumpulan massa (kerumunan) oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID-19 juga menyebabkan terdampaknya retribusi pada UPT. Pelatihan Kesehatan

sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara daring. Adanya peraturan BPJS Kesehatan terkait sistem rujukan berjenjang juga berimplikasi pada menurunnya jumlah kunjungan pasien di UPT. RS Khusus Mata, dimana RS Khusus Mata yang Kelas B tidak dapat menerima rujukan langsung pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Realisasi belanja daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SILPA) sebesar Rp. 585.030.801.517,00 (92,11%), terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 575.809.821.453,00 (92,25%), dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 9.220.980.064,00 (84,07%). Realisasi belanja mengalami peningkatan sebesar 0,65 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 yaitu 91,46 persen. Jumlah alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4
Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran APBD/P-APBD
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA. 2021

No.	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	431.823.339.341,00	399.834.046.101,00	92.59
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.736.272.671,00	21.726.112.145,00	68.46
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	230.591.000,00	184.922.580,00	80.20
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.299.199.800,00	1.153.535.400,00	88.79
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	170.030.890.184,00	162.113.985.291,00	95.34
T O T A L		635.120.292.996,00	585.012.601.517,00	92.11

Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan capaian Renstra PD selanjutnya dapat dilihat pada lampiran I Renja SKPD ini (Tabel. 2.11).

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara harus dipandang memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, tanpa diskriminasi.

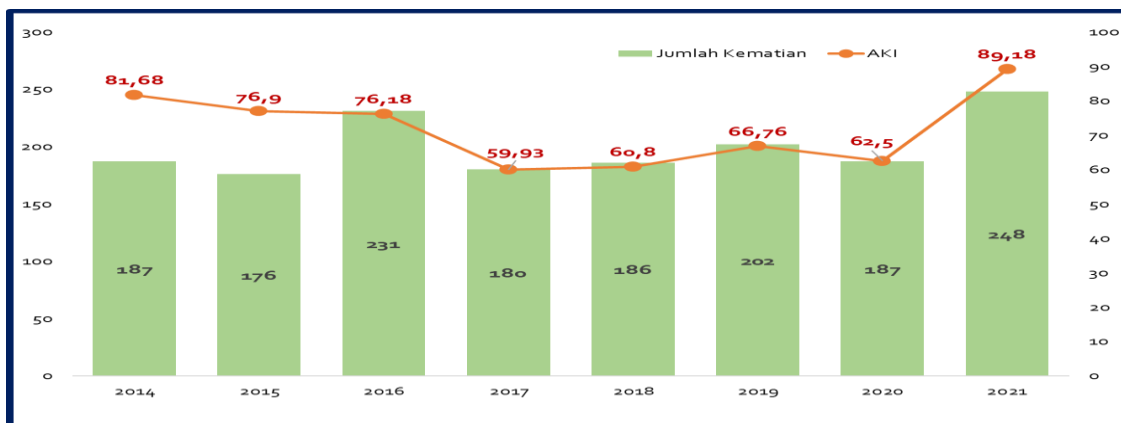
Angka Kematian Ibu (AKI)

Tinggi rendahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dapat mencerminkan status kesehatan dan gizi ibu selama hamil dan nifas, kualitas pelayanan kesehatan, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi suatu wilayah. Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Untuk mendapatkan data AKI yang terpercaya, maka data AKI harus diperoleh dari survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun lembaga survey lainnya yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Sayangnya, karena ketiadaan survey dimaksud, maka data AKI yang disajikan merupakan hasil Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) dan laporan dari kabupaten/kota, yaitu jumlah kematian ibu yang dilaporkan dibagi dengan jumlah kelahiran hidup (sasaran ibu hamil) dikali 100.000.

Pada tahun 2021, diperoleh jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 248 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup, sehingga bila dikonversi, maka diperoleh AKI di Provinsi Sumatera Utara sebesar 89.18 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan AKI pada Tahun 2020, yaitu 62.50 per 100.000 kelahiran hidup (187 kasus kematian ibu dari 299.198 sasaran lahir hidup), dan AKI Tahun 2019 (yakni 66.76 per 100.000 kelahiran hidup).

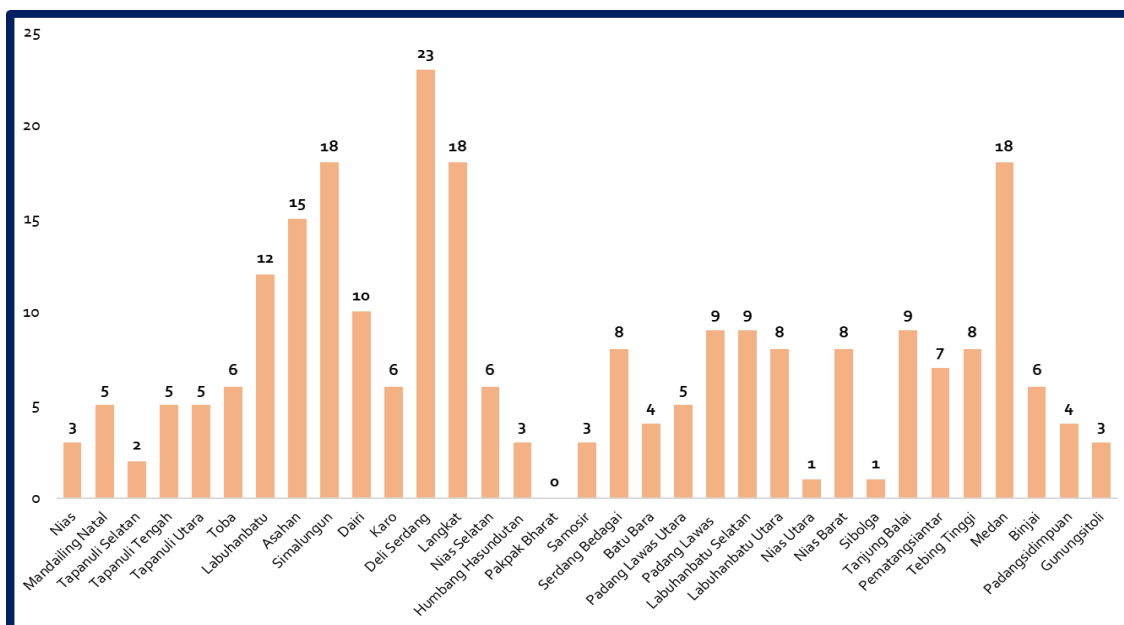
Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 93.49 per 100.000 kelahiran hidup, maka AKI di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 telah melampaui target.

Gambar 2.1
AKI dan Kasus Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2021



Distribusi kasus kematian ibu per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2
Kasus Kematian Ibu per Kabupaten/Kota Tahun 2021

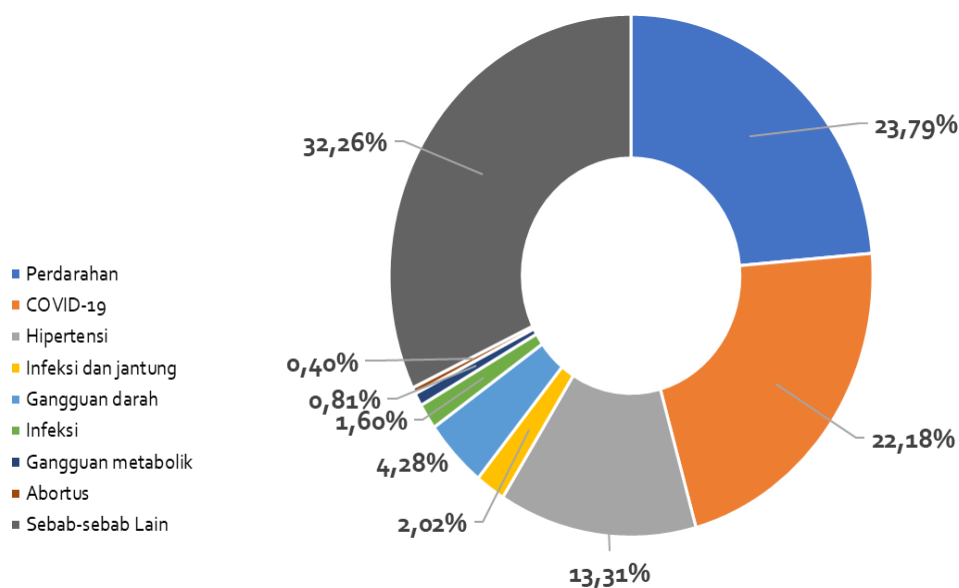


Gambar di atas menunjukkan bahwa hanya ada 1 (satu) kabupaten yang tidak ditemukan kasus kematian ibu di wilayahnya sepanjang tahun 2021, yaitu Kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan kasus kematian tertinggi pada tahun 2021 ada di Kabupaten Deli Serdang (23 kasus), diikuti Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, dan Kota Medan (masing-masing 18 kasus).

Tingginya kasus kematian ibu di tahun 2021 disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) banyaknya ibu hamil serta melahirkan yang terpapar COVID-19 dan meninggal dunia, (2) banyaknya ibu hamil yang merasa ragu untuk memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas karena takut tertular COVID-19 sehingga menyebabkan ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil secara lengkap sesuai standar, (3) terbatasnya APD untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan bagi petugas di Puskesmas dan masih adanya petugas yang belum mengetahui pedoman pelayanan pada masa pandemic COVID-19, dan (4) adanya pembatasan beberapa pelayanan berdasarkan pedoman pelayanan pada masa pandemic COVID-19 terutama pada ibu yang terinfeksi COVID-19.

Penyebab terbesar kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah perdarahan sebanyak 59 kasus (23,79%), diikuti COVID-19 sebanyak 55 kasus (22,18%), hipertensi sebanyak 33 kasus (13,31%), infeksi dan jantung masing-masing sebanyak 5 kasus (2,02%), gangguan metabolik sebanyak 2 kasus (0,81%), abortus sebanyak 1 kasus (0,40%) dan sebab lain-lain (abortus, partus macet, emboli obstetri) mencapai 80 kasus (32,26%).

Gambar 2.3
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2021



Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 diperoleh proporsi perempuan hamil di Provinsi Sumatera Utara yang pernah mendapatkan tablet tambah darah (TTD) sebesar 80.1 persen, menempatkan Provinsi Sumatera Utara sebagai peringkat terbawah. Hasil SSGI Tahun 2021 juga menunjukkan bahwa proporsi perempuan ibu hamil usia 10-54 tahun di Provinsi Sumatera Utara yang bersalin di fasilitas kesehatan sebesar 85.9 persen, serta proporsi Wanita Usia Subur (WUS)/ Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan KB modern sebesar 37.4 persen dan menempatkan Provinsi Sumatera Utara pada peringkat 4 (empat) terbawah.

Keberhasilan pencapaian target kasus kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 didukung oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan. Di samping itu, tersedia pula dukungan anggaran bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan dalam bentuk jaminan persalinan serta Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten dan Puskesmas.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya penurunan kematian ibu, khususnya dalam hal penyebab tidak langsung (*indirect causes*). Karenanya, perlu penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam program kesehatan maternal dan neonatal, peningkatan kerja sama lintas program dan lintas sektor, serta peningkatan perilaku individu/keluarga dan kesetaraan gender dalam pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi.

Untuk menanggulangi permasalahan dan penyebab tidak langsung kematian ibu sebagaimana dimaksud, perlu dilakukan berbagai upaya dalam Kerangka Pendekatan Multisektor dalam rangka Penurunan AKI sebagai berikut:

- (1) *Semua akses dan kualitas pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan, yaitu:*
 - a. Pendekatan *antenatal care* (ANC) dan keluarga berencana,
 - b. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK),
 - c. Sistem rujukan terintegrasi,
 - d. Unit Transfusi Darah (UTD) dan Bank Darah
 - e. Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA), dan obat,

- f. Infrastruktur,
- g. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- (2) *Semua penyebab langsung (direct causes) ditekan dan diturunkan kejadiannya*, seperti perdarahan, eclampsia, hipertensi pada kehamilan, infeksi, aborsi yang tidak aman, penyakit lainnya seperti kardiovaskular, penyakit tidak menular, malaria, TBC, HIV/AIDS,
- (3) *Semua penyebab tidak langsung (indirect causes) dapat diatasi dan ditanggulangi*, seperti anemia, kekurangan energi kronik, *unmet need* KB, *antenatal care* yang tidak berkualitas, kehamilan remaja, kehamilan 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak), penyediaan air bersih dan sanitasi, dan masalah gizi,
- (4) *Upaya perbaikan perilaku individu dan keluarga perlu ditingkatkan*, seperti:
 - a. Pemanfaatan buku KIA,
 - b. Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K),
 - c. Kelas ibu hamil dan ibu balita,
 - d. Posyandu,
 - e. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR),
 - f. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS),
 - g. Konseling Pra-Nikah,
 - h. Rumah Tunggu Persalinan,
 - i. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
- (5) *Upaya perbaikan penyebab dasar (underlying causes)*, seperti peningkatan pemahaman kesetaraan gender dalam Pendidikan, sosial, dan ekonomi.

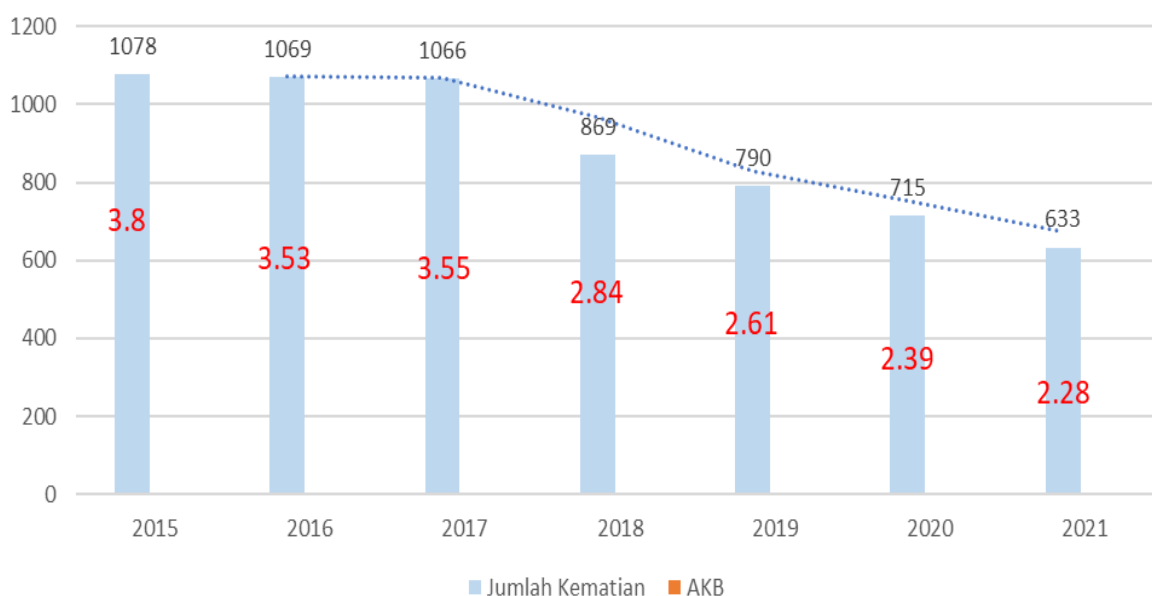
Angka Kematian Bayi (AKB)

Di samping AKI, Angka Kematian Bayi (AKB) juga menjadi tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan Pemerintah, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan tempat tinggal dan status sosial orang tua si bayi. Sama halnya dengan AKI, untuk memperoleh data AKB perlu dilakukan survey, baik oleh BPS maupun lembaga-lembaga yang telah diakui baik secara nasional maupun internasional. Mengingat ketiadaan survey, maka data AKB yang disajikan didasarkan pada hasil Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) dan

laporan dari kabupaten/kota, yaitu jumlah kematian bayi yang dilaporkan dibagi dengan jumlah sasaran lahir hidup dikali 1.000.

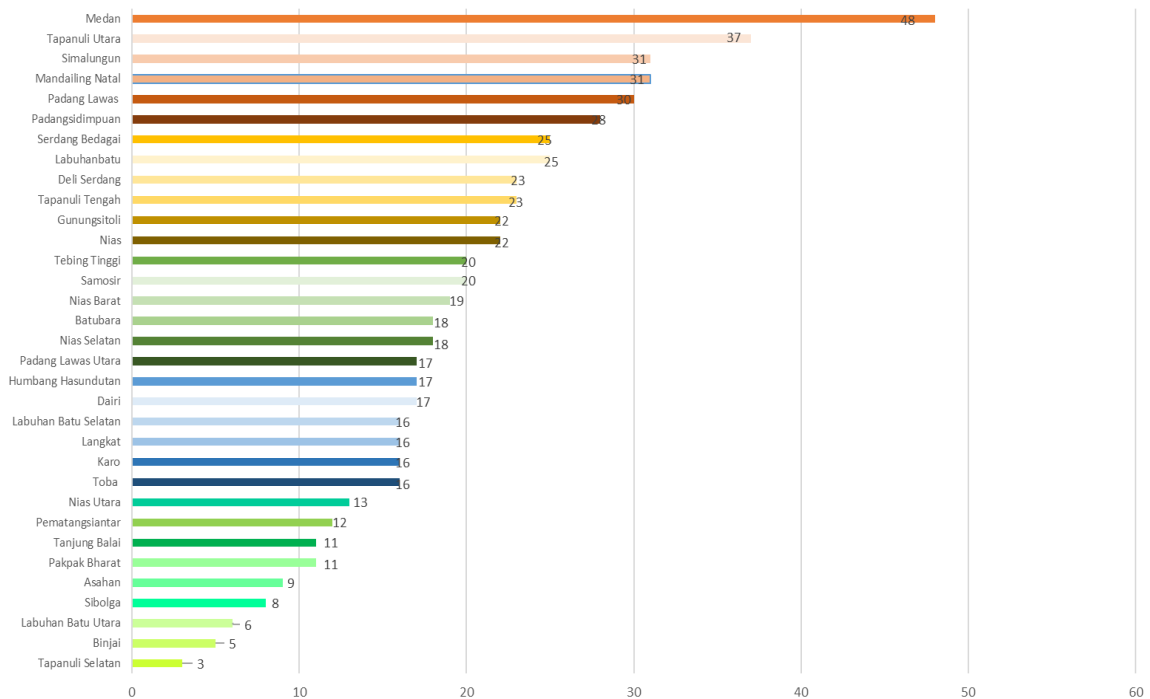
Pada tahun 2021, diperoleh jumlah kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 633 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup, sehingga bila dikonversi, maka diperoleh AKB di Provinsi Sumatera Utara sebesar 2.28 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan AKB pada Tahun 2020, yaitu 2.39 per 1.000 kelahiran hidup (715 kasus kematian bayi dari 299.198 sasaran lahir hidup). Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 2.44 per 1.000 kelahiran hidup, maka AKB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 telah melampaui target.

Gambar 2.4
AKB dan Kasus Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2021



Kasus kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 jika dilihat per kabupaten/kota seperti pada gambar berikut ini:

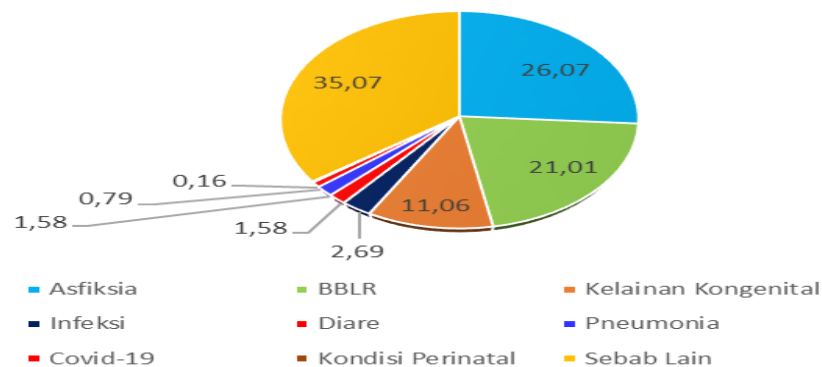
Gambar 2.5
Kasus Kematian Bayi per Kabupaten/Kota Tahun 2021



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kematian bayi terbanyak tahun 2021 ada di Kota Medan (48 kasus), diikuti Kabupaten Tapanuli Utara (37 kasus), Kabupaten Simalungun dan Mandailing Natal (masing-masing 31 kasus), Kabupaten Padang Lawas Utara (30 kasus) dan Kota Padangsidempuan (28 kasus). Sedangkan kasus kematian bayi terendah ada di Kabupaten Tapanuli Selatan (3 kasus), Kota Binjai (5 kasus), dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (6 kasus).

Penyebab kematian bayi tahun 2021 seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.6
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2021



Penyebab kematian bayi terbesar di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah asfiksia sebanyak 133 kasus (26.07%), Berat Bayi Lahir Rendah/BBLR sebanyak 161 kasus (21.01%), kelainan sebanyak 70 kasus (11.06%), infeksi sebanyak 17 kasus (2,69%), diare dan pneumonia sebanyak 10 kasus (1.58%), COVID-19 sebanyak 5 kasus (0.79%), kondisi perinatal sebanyak 1 kasus (0,16%), dan sebab-sebab lain sebanyak 222 kasus (35.07%).

Keberhasilan penurunan kasus kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 didukung oleh berbagai faktor, diantaranya adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara, peningkatan cakupan akreditasi Puskesmas dan rumah sakit, serta upaya peningkatan pemahaman, keterampilan dan kemampuan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui pembinaan, bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan. Disamping itu, terdapat alokasi dana transfer ke daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Non Fisik untuk program jaminan persalinan, rumah tunggu kelahiran bagi ibu hamil, serta BOK Kabupaten dan Puskesmas.

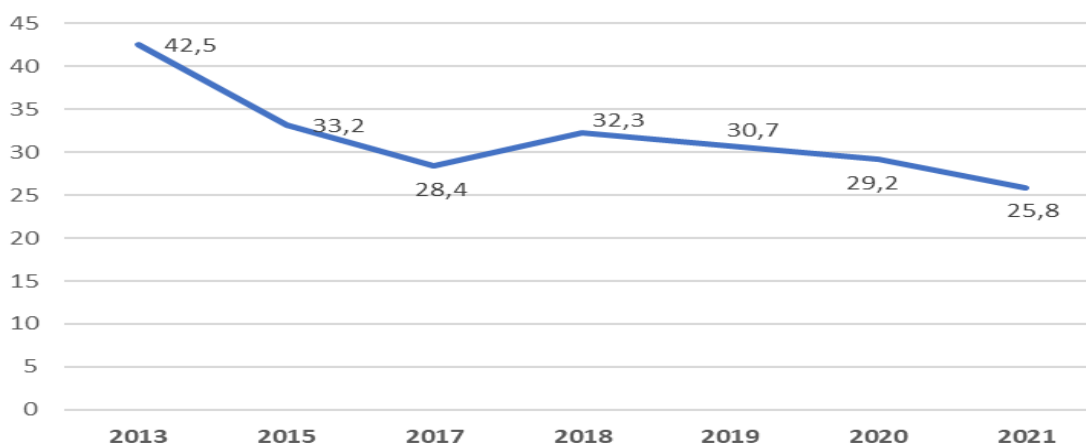
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penurunan kasus kematian bayi diantaranya adalah belum optimalnya tata kelola klinis, belum optimalnya kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan, pencatatan dan pelaporan, serta belum optimalnya kualitas ANC (*Antenatal Care*). Selain itu, kondisi ibu hamil dengan anemia, adanya infeksi, tingkat kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, serta masih rendahnya koordinasi serta kerjasama lintas sektor.

Prevalensi Stunting pada Balita

Status gizi berkontribusi terhadap kondisi *sehat-sakit* karena dapat memengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah gizi yang dijumpai di Provinsi Sumatera Utara adalah *stunting*, yaitu kondisi yang mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian, periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) perlu mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), dan diperoleh prevalensi *stunting* pada balita di Provinsi Sumatera Utara sebesar 25.8%, menurun sebesar 2.9% bila dibandingkan dengan prevalensi *stunting* pada tahun 2020 (28.7%). Meski terjadi penurunan, prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi *stunting* balita secara nasional, yaitu 24.4%, dan masih jauh dari besar prevalensi yang disarankan oleh WHO (yaitu di bawah 20%). Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 28.50%, maka prevalensi *stunting* pada balita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 telah mencapai target.

Gambar 2.7
Prevalensi *Stunting* pada Balita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2021



Prevalensi *stunting* pada balita tertinggi ada di Kabupaten Mandailing Natal (47.0%), Kabupaten Padang Lawas (42.0%), Kabupaten Pakpak Barat (40.8%), Kabupaten Nias Selatan (36.7%), Kabupaten Nias Utara (34.4%), Kabupaten Dairi (34.2%), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (33.1%). Sedangkan prevalensi *stunting* pada balita terendah dan di bawah 20% sesuai yang disarankan oleh WHO ada di Kabupaten Deli Serdang (12.5%), Kota Pematangsiantar (15.0%), Kota Tebing Tinggi (17.3%) dan Kabupaten Asahan (18.9%) dan Kota Medan (19.9%). Secara keseluruhan, terdapat 11 kabupaten/kota dengan prevalensi *stunting* di bawah prevalensi Provinsi, dan 22 kabupaten/kota dengan prevalensi *stunting* di atas prevalensi Provinsi.

Tabel 2.5
Prevalensi Stunting pada Balita per Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	Prevalensi Stunting (%)
1	Kabupaten Mandailing Natal	47.7
2	Kabupaten Padang Lawas	42.0
3	Kabupaten Pakpak Bharat	40.8
4	Kabupaten Nias Selatan	36.7
5	Kabupaten Nias Utara	34.4
6	Kabupaten Dairi	34.2
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	33.1
8	Kabupaten Nias	32.1
9	Kota Padangsidimpuan	32.1
10	Kabupaten Langkat	31.5
11	Kabupaten Batu Bara	30.9
12	Kabupaten Labuhanbatu Utara	30.9
13	Kabupaten Tapanuli Selatan	30.8
14	Kabupaten Samosir	28.4
15	Kabupaten Simalungun	28.0
16	Kabupaten Nias Barat	27.9
17	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	27.0
18	Kabupaten Labuhanbatu	27.0
19	Kabupaten Humbang Hasundutan	26.7
20	Kabupaten Tapanuli Utara	26.7
21	Kota Gunungsitoli	26.3
22	Kota Tanjung Balai	26.1
23	Sibolga	25.8
24	Karo	25.3
25	Tapanuli Tengah	25.3
26	Toba	24.8
27	Binjai	21.7
28	Serdang Bedagai	20.0
29	Medan	19.9
30	Asahan	18.9
31	Tebing Tinggi	17.3
32	Pematangsiantar	15.0
33	Deli Serdang	12.5
Sumatera Utara		25.8

Pada tahun 2021, terdapat penambahan daerah baru lokasi fokus (lokus) prioritas intervensi *stunting* di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 10 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan demikian, jumlah lokus intervensi *stunting* bertambah menjadi 25 (dua puluh lima) kabupaten/kota, setelah sebelumnya ada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang

Lawas, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.

Tabel 2.6
Lokasi Fokus Intervensi Stunting di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No.	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
1.	Langkat	Langkat	Langkat	Langkat
2.	Padang Lawas	Padang Lawas	Padang Lawas	Padang Lawas
3.	Gunungsitoli	Gunungsitoli	Gunungsitoli	Gunungsitoli
4.	Nias Utara	Nias Utara	Nias Utara	Nias Utara
5.		Simalungun	Simalungun	Simalungun
6.			Mandailing Natal	Mandailing Natal
7.			Nias	Nias
8.			Pakpak Bharat	Pakpak Bharat
9.			Dairi	Dairi
10.			Nias Selatan	Nias Selatan
11.			Nias Barat	Nias Barat
12.			Padang Lawas Utara	Padang Lawas Utara
13.			Tapanuli Tengah	Tapanuli Tengah
14.			Deli Serdang	Deli Serdang
15.			Medan	Medan
16.				Batu Bara
17.				Serdang Bedagai
18.				Humbang Hasundutan
19.				Karo
20.				Asahan
21.				Labuhan Batu
22.				Tapanuli Utara
23.				Padang Sidempuan
24.				Labuhanbatu Utara
25.				Labuhanbatu Selatan
Penambahan Kab/Kota Lokus Intervensi Stunting				

Berdasarkan SSGI Tahun 2021 diketahui proporsi balita dengan berat badan lahir rendah (<2.500 gram) di Provinsi Sumatera Utara sebesar 4.6 persen (Nasional 6.6%), proporsi balita dengan panjang badan lahir <48 cm sebesar 15.4 persen (Nasional 19.4%), proporsi balita yang mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) sebesar 43.7 persen (Nasional 48.6%), dan proporsi bayi usia 0-5 bulan mendapatkan ASI eksklusif sebesar 40.7 persen (peringkat 4 terbawah, Nasional 52.5%), proporsi bayi usia 6-23 bulan mendapatkan ASI eksklusif sebesar 39.7 persen (peringkat 4 terbawah, Nasional 52%), proporsi baduta saat pertama kali diberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) pada usia ≥ 6 bulan sebesar 31.6 persen (peringkat 3 terbawah, Nasional 44.7%),

proporsi anak usia 0-23 bulan mengonsumsi makanan beragam sebesar 55 persen (Nasional 52.5%), proporsi balita yang memiliki buku KIA sebesar 62.0 persen (peringkat 2 terbawah, Nasional 83%), proporsi balita yang melakukan penimbangan berat badan sesuai standar ($\geq 8x$ setahun) sebesar 23.9 persen (peringkat 6 terbawah, Nasional 36.9%), proporsi balita yang melakukan pengukuran tinggi badan sesuai standar ($\geq 2x$ setahun) sebesar 43.8 persen (peringkat 2 terbawah, Nasional 63.7%), proporsi anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebesar 59.3 persen (peringkat 9 terbawah, Nasional 65.8%), proporsi anak usia 6-59 bulan mendapatkan Vitamin A sebesar 59.7 persen (peringkat terbawah, Nasional 80.6%), proporsi baduta yang masih disusui sebesar 66.5 persen (peringkat 10 terbawah, Nasional 75.1%).

Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga perlu penanganan yang komprehensif dan terpadu antar lintas program dan lintas sektor. Beberapa faktor yang paling utama adalah sebagai berikut :

- (a) Koordinasi multisektor dalam intervensi *stunting* (pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi) masih belum optimal di tingkat administrasi kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
- (b) Praktek pengasuhan (pola asuh) yang tidak baik hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, hampir 60% bayi usia 0 – 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif, masih banyak anak usia 6 – 24 bulan yang tidak mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP - ASI). Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MP Asi juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi disokong oleh ASI;
- (c) Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan Ante Natal Care (ANC), Post Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas ditandai dengan masih rendahnya cakupan ibu hamil yang mengonsumsi suplemen zat besi yang memadai, tingkat kehadiran anak di posyandu semakin menurun dan masih banyak anak usia 3–6 tahun yang belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Usia Dini;
- (d) Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi, hal ini dikarenakan harga makanan bergizi yang cukup mahal (hasil Riskesdas, SDKI dan Susenas), hal ini berkontribusi terhadap peningkatan ibu hamil yang mengalami anemia,

- (e) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa masih ada RT yang buang air besar di ruang terbuka dan masih ada rumah tangga yang belum memiliki akses ke air minum bersih.
- (f) Belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan untuk mendukung program penurunan *stunting*,
- (g) Adanya pandemi COVID-19 yang berkontribusi pada rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan juga menurunkan daya beli masyarakat sehingga berimplikasi pada terganggunya asupan gizi.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menurunkan prevalensi *stunting* antara lain:

- Membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) penurunan *stunting* yang melibatkan lintas program dan lintas sektor,
- Intervensi dilakukan pada bayi usia di bawah dua tahun (1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK), dimulai saat ibu hamil sampai bayi berusia 2 tahun, karena periode ini merupakan periode emas dan merupakan jendela kesempatan,
- Intervensi spesifik gizi dengan sasaran ibu hamil melalui pemberian Paket Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil, Vitamin A, dan Tablet Tambah Darah (TTD) dalam rangka mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, serta mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat. Intervensi spesifik gizi (pemberian TTD) juga dapat dilakukan dengan menyasar remaja putri.
- Mendorong pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), terutama melalui pemberian *colostrum* (ASI jolong) serta pemberian ASI eksklusif.
- Melaksanakan Asuhan Gizi Terstandar (AGT) bagi tenaga gizi di Puskesmas di daerah lokus *stunting*,
- Melaksanakan promosi kesehatan melalui kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (Germas) serta pemberdayaan masyarakat,
- Pembinaan kabupaten/kota dalam peningkatan pelayanan ANC, peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan, peningkatan kunjungan neonatal (KN), peningkatan cakupan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program JKN,
- Peningkatan surveilans gizi dan penyediaan PMT bagi balita,
- Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Angka Kesakitan (Morbiditas)

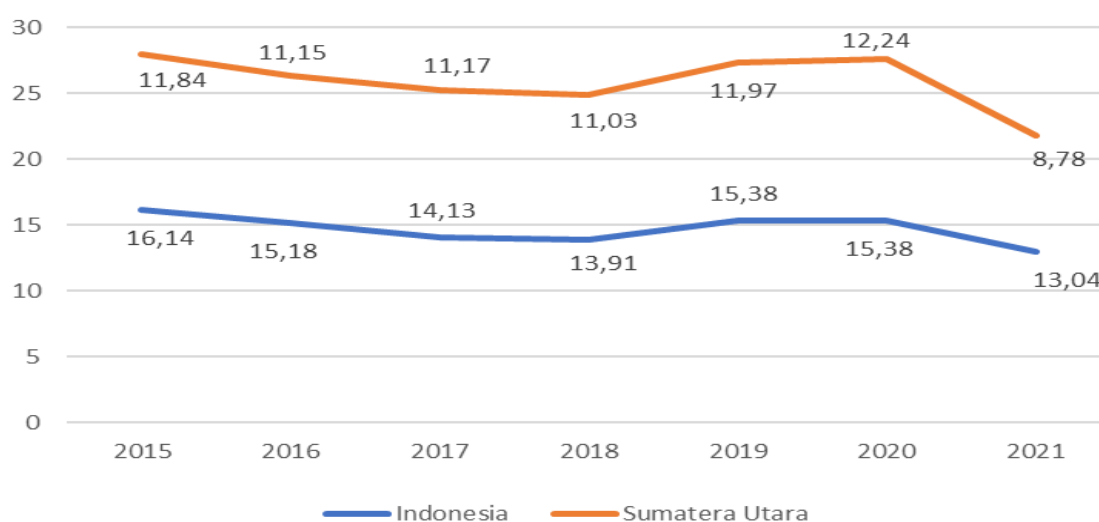
Angka kesakitan (morbidity) merupakan indikator penting yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Transisi demografi dan transisi epidemiologi memberikan dampak pada status kesehatan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Transisi demografi terlihat dari menurunnya angka kematian pada usia muda, serta meningkatnya umur harapan hidup penduduk seiring membaiknya kualitas lingkungan, yang pada akhirnya berdampak kepada perubahan epidemiologi penyakit. Di sisi lain, masih dijumpainya penyakit-penyakit menular (*communicable diseases*), meningkatnya penyakit-penyakit tidak menular (*non-communicable diseases*), serta ditemukannya penyakit-penyakit baru dan penyakit-penyakit lama yang telah dieliminasi namun muncul kembali (*new emerging diseases* dan *re-emerging diseases*), memberikan beban multi penyakit (*triple burden of diseases*) bagi Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu penyakit menular baru (*new-emerging diseases*) dengan tingkat kematian yang cukup tinggi yang dihadapi saat ini adalah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penyakit yang bermula di Wuhan, China, telah menyebar ke berbagai belahan dunia dan telah pula dideklarasikan oleh WHO sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 yang lalu. Sampai dengan akhir Desember 2021, sebanyak 106.119 orang di Provinsi Sumatera Utara dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19, dimana 2.893 orang diantaranya meninggal dunia (Angka Kematian/ *Case Fatality Rate* (CFR) 2.7%). Sampai dengan 31 Maret 2021, jumlah orang terjangkit COVID-19 terus saja bertambah, dan jumlahnya meningkat 45 persen dari keadaan akhir Desember 2021, yaitu 154.520 orang, dimana 3.223 kasus diantaranya berakhir dengan kematian (CFR sebesar 2.1%). Pandemi COVID-19 terbukti tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, tetapi juga mengancam sendi perekonomian dan sendi kehidupan lainnya.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Bidang Kesehatan Tahun 2021, angka kesakitan (morbiditas) di Provinsi Sumatera Utara sebesar 8.78 persen. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan angka kesakitan di tahun 2020 (12.24%). Namun demikian, angka kesakitan tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara sebesar 8.78% masih lebih kecil dibandingkan dengan Angka Kesakitan Masyarakat Indonesia yang sebesar 13.04 persen. Maka angka kesakitan di Provinsi Sumatera Utara sudah jauh dibawah angka nasional dan menempati urutan ketujuh dengan angka kesakitan terendah di Indonesia pada tahun 2021.

Gambar 2.8
Angka Kesakitan di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2021



Angka kesakitan tertinggi dan berada di atas angka nasional ada di Kabupaten Padang Lawas (14.86), Kota Tanjung Balai (14.54%), Kota Gunungsitoli (14.37%), Kabupaten Serdang Bedagai (14.12%), dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (13.25%). Adapun angka kesakitan terendah ada di Kabupaten Samosir (4.86%), Kota Binjai (5.26%), Kabupaten Tapanuli Selatan (5.42%), Kota Pematangsiantar (5.62%), dan Kabupaten Labuhanbatu (5.65%) dan Kota Medan (6.05%). Kondisi morbiditas per kabupaten/kota tahun 2020 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	ANGKA KESAKITAN (%)
1	Nias	12.43
2	Mandailing Natal	10.27
3	Tapanuli Selatan	5.42
4	Tapanuli Tengah	9.79
5	Tapanuli Utara	6.43
6	Toba	8.81
7	Labuhanbatu	5.65
8	Asahan	8.12
9	Simalungun	10.35
10	Dairi	7.12
11	Karo	6.64
12	Deli Serdang	8.41
13	Langkat	9.12
14	Nias Selatan	10.23
15	Humbang Hasundutan	6.48
16	Pakpak Bharat	10.70
17	Samosir	4.86
18	Serdang Bedagai	14.12
19	Batu Bara	10.48
20	Padang Lawas Utara	9.33
21	Padang Lawas	14.86
22	Labuhanbatu Selatan	13.25
23	Labuhanbatu Utara	12.37
24	Nias Utara	9.59
25	Nias Barat	12.01
26	Sibolga	7.94
27	Tanjung Balai	14.54
28	Pematangsiantar	5.62
29	Tebing Tinggi	7.52
30	Medan	6.05
31	Binjai	5.26
32	Padangsidempuan	10.42
33	Gunungsitoli	14.37
Sumatera Utara		8.78

Sepuluh penyakit terbesar Tahun 2021 di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) seperti terlihat di tabel berikut ini:

Tabel 2.8
10 (Sepuluh) Penyakit Terbesar di FKTP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No	Nama Penyakit	Jumlah Kasus
1	<i>Dyspepsia/Dispepsia</i>	313.626
2	<i>Essential (primary) hypertension/Hipertensi</i>	252.198
3	<i>Acute upper respiratory infection, unspecified/ISPA</i>	228.083
4	<i>Acute nasopharyngitis [common cold]/Influenza</i>	222.536
5	<i>Cough/Batuk</i>	138.828
6	<i>Fever, unspecivied/Demam</i>	124.477
7	<i>Gastritis, unspecified/Tukak Lambung/Maag</i>	93.292
8	<i>Headache/Sakit Kepala</i>	93.156
9	<i>Myalgia/Gangguan pada otot</i>	92.511
10	<i>Influenza, Virus Not Identified</i>	74.013

Tabel 2.9
**10 (Sepuluh) Penyakit Terbesar Rawat Jalan di FKRTL
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021**

No	Nama Penyakit	Jumlah Kasus
1	<i>Pemeriksaan lanjutan/ Follow-up examination after other treatment for other conditions</i>	1.357.067
2	<i>Cuci Darah/ Extracorporeal dialysis</i>	178.631
3	<i>Fisioterapi/Other physical therapy</i>	70.770
4	<i>Pemeriksaan kesehatan mata dan penglihatan/Examination of eyes and vision</i>	43.878
5	<i>Perawatan medis untuk pemulihan/ Other specified medical care</i>	37.191
6	<i>Pemeriksaan lanjutan yang Tidak Spesifik/ Follow up Examinataion after unspecified treatment for other conditions</i>	31.694
7	<i>Penyakit saluran kemih/ Personal history of diseases of the genitourinary system</i>	29.823
8	<i>Radio terapi/ Radiotherapy session</i>	25.886
9	<i>Pemasangan lensa intraokulat/ Presence of intaocular lens</i>	25.481
10	<i>Pemeriksaan lanjutan pasca tindakan operasi/ Other specified surgical follow-up care</i>	22.642

Tabel 2.10
10 (Sepuluh) Penyakit Terbesar di Ruang Rawat Inap FKRTL
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Perawatan Bayi Baru Lahir Sectio/ <i>Fetus and Newborn affected by caesarean delivery</i>	23.149
2	Sectio Caesaria/ <i>Maternal Care due to uterine scar from previous surgery</i>	19.508
3	Demam Thypoid/ <i>Typhoid Fever</i>	11.550
4	Dispepsia/ <i>Dyspepsia</i>	10.784
5	Infeksi paru/ <i>Pneumonia</i>	9.803
6	Perawatan Ibu Hamil dengan Bayi Sungsang/ <i>Maternal care for transverse and oblique lie</i>	6.484
7	Infeksi Pencernaan/ <i>Gastroenteritis and colitis of unspecifed origin</i>	6.138
8	Penyakit Ginjal Kronik/ <i>Chronic Kidney Disease</i>	3.895
9	Kolik/ <i>Other and unspecified abdominal pain</i>	3.460
10	Melahirkan spointan/ <i>Single Spontaneous delivery</i>	2.799

Dari ketiga tabel di atas dapat dilihat, penyakit yang paling besar ditemukan sepanjang tahun 2021 adalah penyakit infeksi dan penyakit tidak menular, baik di FKTP maupun di FKTL. Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan angka kesakitan adalah meningkatnya faktor resiko kesakitan pada masyarakat berupa kerentanan penyakit yang meliputi : (a) Kerentanan individu (*susceptibility*), (b) Kerentanan lingkungan, dan (c) Kerentanan perilaku penyebab timbulnya kesakitan.

Hasil SSGI Tahun 2021 menunjukkan bahwa proporsi balita yang menderita ISPA berdasarkan diagnosis/gejala di Provinsi Sumatera Utara sebesar 21.9 persen (Nasional 24.1%), proporsi balita yang menderita pneumonia berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 1.1 persen (Nasional 1.7%), proporsi balita yang menderita diare berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 7.5 persen (Nasional 9.8%), proporsi balita yang menderita kecacingan berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 1 persen (Nasional 2.8%), proporsi balita yang menderita campak berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 2 persen (Nasional 3.5%), proporsi anggota rumah tangga yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan sebesar 27.8 persen (Nasional 36.8%), proporsi balita yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 93.5 persen (Nasional 93.2%), proporsi rumah tangga yang memiliki akses sarana air minum yang layak sebesar 73.1 persen (Nasional 66.3%), proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 75.2 persen (Nasional 81.9%).

Upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka kesakitan meliputi peningkatan kualitas SDM secara terus menerus melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan pelatihan teknis; advokasi pengambilan kebijakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan dukungan lintas program dan lintas sektor dalam rangka perbaikan gizi masyarakat, penyelenggaraan imunisasi, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan surveilans kesehatan, melaksanakan penyelidikan epidemiologi, penemuan kasus secara aktif dan penelusuran kontak erat (*testing and tracing*), peningkatan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih, meningkatkan promosi kesehatan melalui kampanye Germas, kampanye penerapan protokol kesehatan (yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas (5M).

Capaian kinerja pelayanan SKPD selanjutnya dapat dilihat pada lampiran II Ranhir Renja SKPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tahun 2023 adalah tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019–2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2019–2023. Pada Pemilukada yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang telah dilantik pada tanggal 5 September 2018 mengusung visi ‘***Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat***’ dengan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2023 sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- (2) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat disertai harmonis.
- (3) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- (4) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.
- (5) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah dan berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Program/kegiatan yang disusun dalam Renja PD Tahun 2023 ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019–2023, khususnya dalam upaya mencapai misi ke-1, yaitu *bermartabat dalam kehidupan karena memiliki kesehatan yang prima*, yang diselaraskan dengan arah kebijakan, Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas pembangunan kesehatan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Provinsi memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan SPM kesehatan yang terdiri dari (a) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan (b) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Kedua indikator SPM Provinsi tersebut telah diintegrasikan dalam Renja PD Tahun 2023 dan telah disesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan. Berdasarkan evaluasi hasil capaian pembangunan kesehatan, diketahui bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara masih belum menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya capaian sasaran strategis, masih lemahnya mekanisme koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan sinkronisasi/integrasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pembangunan kesehatan, serta politik anggaran yang belum menjadikan pembangunan sektor kesehatan sebagai isu penting dalam pembangunan Sumatera Utara, yang dibuktikan dengan masih rendahnya alokasi anggaran kesehatan bila dibandingkan dengan tuntutan Undang-Undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 171 ayat 2).

Lebih lanjut, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dihadapkan pada beban multi penyakit (*triple burden of diseases*) serta meningkatnya populasi penduduk usia lanjut. Beban multi penyakit ditandai dengan perubahan pola penyakit penyebab kematian dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (transisi epidemiologi), disertai dengan munculnya penyakit-penyakit baru (*emerging diseases*) seperti pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Pertambahan populasi penduduk usia lanjut (sebagai konsekuensi meningkatnya umur harapan hidup waktu lahir dan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan) juga dapat berimplikasi pada sistem kesehatan. Situasi tersebut berdampak pada perubahan kebutuhan jenis tenaga kesehatan, tuntutan akan pelayanan kesehatan yang lebih maju, serta kebutuhan biaya kesehatan yang lebih besar. Tantangan lain yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah bagaimana mereduksi disparitas status kesehatan masyarakat antar wilayah termasuk dalam hal disparitas pembiayaan kesehatan, persebaran tenaga kesehatan, dan ketersediaan sarana dan teknologi kedokteran dalam mewujudkan keadilan (*equity*) dan pemerataan (*equality*) pembangunan kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga dihadapkan pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan ketersediaan fasilitas kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Pelayanan kesehatan diharapkan menjangkau populasi yang belum/tidak terjangkau (*reach the unreached*) serta melayani masyarakat yang tidak terlayani (*serve the underserved*), termasuk mereka yang rentan (*vulnerable groups*). Regionalisasi RS dan sistem rujukan terintegrasi yang diharapkan menjadi solusi bagi kompleksitas pelayanan rujukan di Sumatera Utara perlu dilakukan penguatan sehingga implementasinya bisa memberikan hasil yang memuaskan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar serta dalam menciptakan kepuasan konsumen kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah juga dihadapkan pada pencapaian target indikator-indikator yang dituangkan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yang merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs 2015. Perlu dilakukan penguatan program dan kegiatan yang berkaitan dengan TPB/SDGs mengingat semakin dekatnya tenggat waktu untuk pencapaian tujuan TPB/SDGs dimaksud. Di sisi lain, Pasar Bebas Asean (*Asean free trade*) dan Masyarakat Ekonomi Asean (*Asean Economic Community*) telah pula berlaku, sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Utara dan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada untuk bersaing dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas.

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, asuransi kesehatan yang sebelumnya dikelola oleh beberapa lembaga menjadi terintegrasi pada satu badan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang telah beroperasi mulai 1 Januari 2014 melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sampai dengan akhir Desember tahun 2021, capaian persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 77,02%, masih jauh dari target minimal cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) yaitu sebesar 95%. Hanya terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang telah UHC di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Pakpak Bharat dan Kota Sibolga. Rendahnya cakupan jaminan kesehatan dimaksud disebabkan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI)/Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam mengikuti program JKN/KIS mandiri, serta adanya kenaikan iur premi PBI/PBPU yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga membebani pembiayaan jaminan kesehatan yang telah dianggarkan. Perlu kerja keras dan kerja sama semua pihak dalam upaya meningkatkan capaian JKN/KIS di Provinsi Sumatera Utara.

Terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menjadi lokus kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatera Utara, yaitu **Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Medan**. Kemiskinan ekstrem adalah suatu kondisi yang langka akan kebutuhan dasar manusia termasuk makanan, air, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi (kemiskinan ekstrem) bergantung pada pendapatan dan ketersediaan kebutuhan dasar. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yaitu suatu forum lintas sektor dan lintas pelaku di daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah daerah. Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan ibu,

peningkatan kesehatan anak, dan penurunan angka kesakitan. Area intervensi penanggulangan kemiskinan dikaitkan dengan isu strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Lokasi Prioritas Intervensi Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas	Isu yang diintervensi			
	AKI	AKB	AKABA	UHH
Prioritas 1	1. Tanjung Balai 2. Tapanuli Tengah 3. Batu Bara 4. Nias Barat	1. Gunungsitoli 2. Tanjung Balai 3. Batu Bara 4. Tapanuli Tengah 5. Samosir	1. Tanjung Balai 2. Nias Selatan 3. Samosir 4. Tapanuli Tengah	1. Tanjung Balai 2. Sibolga 3. Tapanuli Tengah 4. Nias Selatan 5. Batu Bara 6. Nias Barat
Prioritas 2	1. Gunungsitoli 2. Sibolga 3. Nias 4. Samosir 5. Nias Utara 6. Nias Selatan	1. Sibolga 2. Nias 3. Nias Selatan 4. Nias Utara 5. Nias Barat	1. Sibolga 2. Gunungsitoli 3. Nias 4. Nias Utara 5. Nias Barat 6. Batu Bara	1. Gunungsitoli 2. Samosir 3. Nias 4. Nias Utara
Prioritas 3	1. Medan 2. Labuhanbatu Utara 3. Dairi 4. Langkat 5. Mandailing Natal 6. Karo 7. Tapanuli Utara 8. Serdang Bedagai 9. Deli Serdang 10. Asahan	1. Serdang Bedagai 2. Karo 3. Langkat 4. Tapanuli Utara 5. Dairi 6. Deli Serdang 7. Labuhanbatu 8. Humbang Hasundutan 9. Labuhanbatu Utara	1. Tebing Tinggi 2. Serdang Bedagai 3. Deli Serdang 4. Padang Lawas 5. Karo 6. Langkat 7. Tapanuli Utara	1. Padang Lawas Utara 2. Asahan 3. Mandailing Natal 4. Labuhanbatu 5. Tapanuli Selatan 6. Tapanuli Utara 7. Dairi 8. Padang Lawas 9. Pakpak Bharat 10. Serdang Bedagai 11. Labuhanbatu Selatan
Prioritas 4	1. Binjai 2. Tebing Tinggi 3. Padangsidimpuan 4. Pematangsiantar 5. Labuhanbatu 6. Simalungun 7. Tapanuli Selatan 8. Humbang Hasundutan 9. Padang Lawas 10. Labuhanbatu Selatan 11. Padang Lawas Utara 12. Pakpak Bharat 13. Toba	1. Medan 2. Binjai 3. Tebing Tinggi 4. Padangsidimpuan 5. Pematangsiantar 6. Mandailing Natal 7. Asahan 8. Simalungun 9. Tapanuli Selatan 10. Padang Lawas 11. Labuhanbatu Selatan 12. Pakpak Bharat 13. Toba	1. Medan 2. Binjai 3. Padangsidimpuan 4. Pematangsiantar 5. Dairi 6. Labuhanbatu 7. Humbang Hasundutan 8. Labuhanbatu Utara 9. Mandailing Natal 10. Asahan 11. Simalungun 12. Tapanuli Selatan 13. Labuhanbatu Selatan 14. Padang Lawas Utara 15. Pakpak Bharat 16. Toba	1. Medan 2. Binjai 3. Tebing Tinggi 4. Padangsidimpuan 5. Pematangsiantar 6. Humbang Hasundutan 7. Deli Serdang 8. Labuhanbatu Utara 9. Langkat 10. Karo 11. Toba 12. Simalungun

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara perlu memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dalam kaitannya dengan upaya intervensi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada kabupaten/kota yang termasuk dalam **Prioritas 1** dan **Prioritas 2**.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda dunia juga memberikan dampak yang signifikan bagi negara Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di samping berdampak pada sektor kesehatan yang ditandai

dengan tingginya angka kesakitan dan angka kematian (*infection fatality rate*), COVID-19 juga memberikan dampak kepada sektor perekonomian yang berakibat pada rendahnya potensi penerimaan negara dan daerah. Rendahnya potensi penerimaan daerah selanjutnya berkontribusi pada rendahnya belanja daerah, sehingga membutuhkan restrukturisasi program/kegiatan dan prioritas belanja kesehatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 mengambil tema '*Akselerasi Pencapaian Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan SUMUT Bermartabat*' dengan indikator makro terkait kesehatan yang ingin dicapai adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72.25 – 72.75 poin dan indikator kinerja utama Gubernur Sumatera Utara yaitu Indeks Kesehatan sebesar 75.75 – 76.25 poin. Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan tahun 2023 adalah akselerasi pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat dengan menerapkan strategi kebijakan kolaborasi perencanaan pembangunan daerah (KOPPDAR), *money follow program priority*, dan Gagasan 3-SP (sukses perencanaan, sukses pelaksanaan, dan sukses pencapaian) dalam pembangunan daerah.

Terdapat 8 (delapan) prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, yaitu (1) Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan dengan 11 Kegiatan Strategis Daerah (KSD), (2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan 7 KSD, (3) Peningkatan kesempatan kerja berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan dengan 4 KSD, (4) Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dengan 5 KSD, (5) Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata dengan 6 KSD, (6) Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan 3 KSD, (7) Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga dengan 10 KSD, dan (8) Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan dengan 8 KSD.

Program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan **peningkatan derajat kesehatan masyarakat** dengan menekankan pada strategi utama *Membangun Desa Menata Kota*. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 telah memedomani nomenklatur

perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terdapat 7 KSD pada prioritas pembangunan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yaitu: (1) Penanganan COVID-19 melalui penguatan Pola 3T (*testing, tracing, dan treatment*), percepatan vaksinasi, penyediaan obat-obatan, penguatan kapasitas Rumah Sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis, (2) Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat, (3) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi *stunting*, (4) Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (serratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada RS Jiwa Prof. M. Ildrem, (5) Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 kabupaten/kota, (6) Pemberian jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 jiwa, dan (8) Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 memperhatikan usulan kegiatan yang diperoleh dari pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kesehatan (Pra Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Utara. Usulan kegiatan tersebut selanjutnya ditelaah dan analisa dalam rangka memperhatikan kesesuaian antara usulan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Bidang Kesehatan tahun 2022 sebagai upaya sinkronisasi program/kegiatan dengan stakeholder terkait.

Tabel 2.12 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penanganan COVID-19	Deli Serdang	Tersedianya: - RDT Antigen - Gown medis	50.000 buah 20.000 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran Provinsi
		Langkat	Tersedianya Vitamin, Masker, dan Hand Sanitizer	✓	
		Binjai	Tersedianya obat-obatan, RDT Antigen, Masker, Handscoon, dan Gown medis.	✓	
		Batu Bara	Tersedianya obat-obatan, RDT Antigen, Masker, dan Handscoon	✓	
		Asahan	Tersedianya obat-obatan COVID-19	✓	
		Tanjung Balai	Tersedianya obat-obatan, Masker, dan Handscoon	✓	
		Labuhanbatu	Tersedianya obat-obatan, Masker, Handscoon, Hand Sanitizer dan Gown medis	✓	
		Labuhanbatu Utara	Tersedianya obat-obatan COVID-19	✓	
		Labuhanbatu Selatan	Tersedianya: - Obat-obatan - RDT Antigen - Masker - Handscoon - Hand Sanitizer	11.000 buah 2.000 buah 2.000 buah 2.000 buah	
		Tapanuli Tengah	Tersedianya obat-obatan, Vitamin, RDT Antigen, Masker, Hand Sanitizer, Gown medis, dan tabung oksigen	✓	
		Sibolga	Tersedianya obat-obatan COVID-19	✓	
		Mandailing Natal	Tersedianya Masker, Handscoon, Nurse Cap, Hand Sanitizer, dan Gown medis	✓	
		Padang Lawas Utara	Tersedianya obat-obatan COVID-19	✓	
		Padangsidempuan	Tersedianya Vitamin, RDT Antigen, dan Masker	✓	
		Karo	Tersedianya RDT Antigen	✓	
		Tapanuli Utara	Tersedianya obat-obatan, Vitamin, dan Gown medis	✓	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penanganan COVID-19 (Lanjutan)	Dairi	Tersedianya: - Obat-obatan - RDT Antigen - Masker - Handscoon - Hand Sanitizer	1.152 buah 200 buah 1.000 buah 1.800 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran Provinsi
		Samosir	Tersedianya Nurse cap, Hand Sanitizer, Shoe Cover, dan Gown medis	✓	
		Humbang Hasundutan	Tersedianya obat-obatan, Masker, Handscoon, dan Nurse cap.	✓	
		Simalungun	Tersedianya: - Obat-obatan - Vitamin - RDT Antigen - Masker - Handscoon - Nurse Cap	5.000 buah 2.000 buah 300 buah 200 buah	
		Pematang Siantar	Tersedianya obat-obatan, RDT Antigen, Masker, dan Handscoon	✓	
		Nias Selatan	Tersedianya obat-obatan, Vitamin, dan Masker	✓	
		Nias Barat	Tersedianya obat-obatan, dan RDT Antigen	✓	
2.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Medan	Tersedianya PMT bagi ibu hamil dan balita kurus		Disesuaikan dengan kemampuan anggaran Provinsi
		Serdang Bedagai	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus	2.146 2.400	
		Langkat	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus	20.000 ✓	
		Binjai	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	✓ ✓ ✓	
		Tebing Tinggi	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus	200 300	
		Batu Bara	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus	422 900	
		Asahan	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	750 1.175 830	
		Tanjung Balai	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus	632 1.204	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) <i>(Lanjutan)</i>	Labuhanbatu	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	700 1.586 100	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran Provinsi
		Labuhanbatu Utara	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	✓ ✓ ✓	
		Labuhanbatu Selatan	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	500 250 ✓	
		Tapanuli Tengah	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	9.478 41.686 8.890	
		Sibolga	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	34 156 727	
		Mandailing Natal	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	828 427 11.641	
		Padang Lawas	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	8.000 37.000 2.382	
		Padang Lawas Utara	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	338 561 1.100	
		Padangsidempuan	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus	3.326 3.147	
		Dairi	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	3.750 9.000 20.000	
		Pakpak Bharat	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	1.006 948 926	
		Tapanuli Utara	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	150 200 5.000	
		Samosir	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus	114 181	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) (Lanjutan)	Humbang Hasundutan	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus	56 286	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran Provinsi
		Simalungun	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus	✓ ✓	
		Pematang Siantar	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	✓ ✓ ✓	
		Nias	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus	627 1.167	
		Nias Selatan	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	575 759 342	
		Nias Utara	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus	✓ ✓	
		Nias Barat	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus	674 2.047	
		Gunungsitoli	Tersedianya: - PMT ibu hamil - PMT balita kurus - PMT anak sekolah	350 550 ✓	
3.	Kampanye GERMAS melalui peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Langkat	Tersedianya baliho dan kampanye GERMAS	46 buah	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran Provinsi
		Tebing Tinggi	Tersedianya spanduk dan baliho	✓	
		Batu Bara	Tersedianya spanduk	✓	
		Asahan	Terlaksananya kampanye GERMAS	✓	
		Tanjung Balai	Terlaksananya kampanye GERMAS melalui media elektronik	✓	
		Labuhanbatu	Tersedianya spanduk dan baliho	✓	
		Labuhanbatu Utara	Tersedianya spanduk dan baliho	✓	
		Labuhanbatu Selatan	Terlaksananya kampanye GERMAS	4 kali	
		Tapanuli Tengah	Tersedianya spanduk dan baliho, serta terlaksananya kampanye GERMAS	✓	
		Sibolga	Tersedianya spanduk, dan terlaksananya kampanye GERMAS melalui media elektronik	✓	
		Padang Lawas	Terlaksananya kampanye GERMAS	✓	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Kampanye GERMAS melalui peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) (Lanjutan)	Padang Lawas Utara	Tersedianya kampanye GERMAS melalui: - Spanduk - Koran	30 buah 4 kali	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran Provinsi
		Padangsidempuan	Tersedianya spanduk dan baliho, dan leaflet	✓	
		Karo	Tersedianya spanduk, dan terlaksananya kampanye GERMAS melalui media elektronik	✓	
		Dairi	Tersedianya baliho dan buku, serta terlaksananya kampanye GERMAS melalui Videotron	✓	
		Tapanuli Utara	Tersedianya spanduk, banner, buku, dan poster	✓	
		Samosir	Terlaksananya kampanye GERMAS	✓	
		Humbang Hasundutan	Tersedianya kampanye GERMAS melalui: - Spanduk - Leaflet - Poster	79 buah 135.056 16.936	
		Pematang Siantar	Terlaksananya kampanye GERMAS	✓	
		Nias Selatan	Terlaksananya kampanye GERMAS	✓	
		Nias Barat	Terlaksananya kampanye GERMAS	✓	
4.	Penyediaan jaminan kesehatan bagi PBI Provinsi	Medan	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	30.000 jiwa	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran Provinsi
		Deli Serdang	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	49.000 jiwa	
		Serdang Bedagai	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	6.193 jiwa	
		Langkat	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	24.000 jiwa	
		Binjai	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	10.000 jiwa	
		Tebing Tinggi	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	2.000 jiwa	
		Batu Bara	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	20.000 jiwa	
		Asahan	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	12.866 jiwa	
		Tanjung Balai	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	2.273 jiwa	
		Labuhanbatu	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	10.000 jiwa	
		Labuhanbatu Utara	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	4.600 jiwa	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Penyediaan jaminan kesehatan bagi PBI Provinsi (<i>Lanjutan</i>)	Labuhanbatu Selatan	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	7.700 jiwa	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran Provinsi
		Tapaneli Tengah	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	12.000 jiwa	
		Sibolga	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	1.044 jiwa	
		Mandailing Natal	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	11.553 jiwa	
		Tapaneli Selatan	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi		
		Padang Lawas	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	5.692 jiwa	
		Padang Lawas Utara	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	17.104 jiwa	
		Padangsidempuan	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	10.000 jiwa	
		Karo	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	20.000 jiwa	
		Dairi	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	15.000 jiwa	
		Pakpak Bharat	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	2.500 jiwa	
		Toba	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	3.700 jiwa	
		Tapaneli Utara	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	9.405 jiwa	
		Samosir	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	5.803 jiwa	
		Humbang Hasundutan	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	7.114 jiwa	
		Simalungun	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	16.634 jiwa	
		Pematang Siantar	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	3.670 jiwa	
		Nias	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	5.000 jiwa	
		Nias Selatan	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	3.000 jiwa	
		Nias Utara	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	11.113 jiwa	
		Nias Barat	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	10.235 jiwa	
		Gunungsitoli	Jumlah kepesertaan PBI Provinsi	8.000 jiwa	
5.	Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bergerak (Bis Medis)	Langkat	Terlaksananya layanan Kesehatan bergerak	2 kali	Kec. Bukit Lawang Kec. Tangkahan
		Tapaneli Tengah	Terlaksananya layanan Kesehatan bergerak	3 kali	Kec. Manduaman Kec. Suka Bangun Kec. Siba Bangun
		Padang Lawas	Terlaksananya layanan Kesehatan bergerak	3 kali	Kec. Pinarik Kec. Sihapas Kec. Pasar Ujung Batu

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bergerak (Bis Medis) (Lanjutan)	Padang Lawas Utara	Terlaksananya layanan Kesehatan bergerak	2 kali	Kec. Dolok Kec. Padang Bolak
		Dairi	Terlaksananya layanan Kesehatan bergerak	4 kali	Kec. Tanah Pinem Kec. Gunung Sitember Kec. Sopobutar Kec. Silalahi
		Tapanuli Utara	Terlaksananya layanan Kesehatan bergerak	3 kali	Kec. Garoga Kec. Parmonangan Kec. Adian Koting
		Humbang Hasundutan	Terlaksananya layanan Kesehatan bergerak	3 kali	Kec. Pakkat Kec. Parlilitan Kec. Tarabintang
		Simalungun	Terlaksananya layanan Kesehatan bergerak	3 kali	Kec. Ujung Padang Kec. Bandar Masilam Kec. Silau Kahean
		Nias Barat	Terlaksananya layanan Kesehatan bergerak	1 kali	Kecamatan di Nias Barat
6.	Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	Medan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih/ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Pelatihan BTCLS, GELS, dan PPGD
		Deli Serdang	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih/ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan
		Serdang Bedagai	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih/ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Surveilans dan Laboratorium
		Tebing Tinggi	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih/ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Pelatihan PPGD, BLUD, K3, GELS, dan ATCLS
		Labuhanbatu Utara	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih/ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Pelatihan BTCLS, ATCLS, dan K3RS
		Tapanuli Tengah	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih/ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Pelatihan komunikasi antar pribadi untuk cegah stunting; Pelatihan jabatan fungsional [Adminkes, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat]
		Gunungsitoli	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih/ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Pelatihan BCLS, ACLS, GELS, PONEK, SDIDTK, MTBS, Vaksinator, Gangguan Jiwa
8.	Inisiasi dan Orientasi Sekolah Sehat	Tapanuli Utara	Jumlah sekolah yang diinisiasi dan diorientasi sekolah sehat	Sekolah	
9.	Penyemprotan dinding rumah dalam rangka eliminasi Malaria	Batu Bara	Jumlah rumah yang dilakukan penyemprotan	Unit	4 spraycan
		Asahan	Jumlah rumah yang dilakukan penyemprotan	Unit	4 spraycan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Padang Lawas Utara	Jumlah orang yang dilakukan pengukuran kebugaran jasmani	Orang	Pengukuran Kebugaran Jasmani
		Nias	Jumlah Kab/Kota yang dibina GP2SP	Kab/Kota	Pembinaan Kesehatan Kerja Perempuan (GP2SP)
		Tapianuli Utara	Jumlah pelaksanaan senam massal yang difasilitasi	Kali	Fasilitasi senam massal

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024. Arah kebijakan pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020–2024 adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengambil tema ‘**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**’ dengan 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pembangunan nasional yaitu: (1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, (3) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, (4) Mendorong pemulihan dunia usaha, (5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim), (7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi, dan (8) Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). Sasaran RKP yang berkaitan dengan kesehatan yang harus dicapai tahun 2023 adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73.31 – 73.49.

Fokus Reformasi Kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan COVID-19 dengan meneruskan vaksinasi COVID-19, serta memperkuat Sistem Kesehatan Nasional yang ditandai dengan capaian:

- a. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita 18.4%,
- b. Insidensi TB 231 per 100.000 penduduk,
- c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%,
- d. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) anak usia 12-23 bulan 71%,
- e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%,
- f. RSUD kab/kota dengan 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis lainnya 80%,
- g. Fasilitas kesehatan terakreditasi FKTP sebesar 80% dan RS sebesar 90%,
- h. Sistem surveilans terpadu, real-time, berbasis laboratorium.

Prioritas pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung 5 (lima) arahan utama Presiden dalam rangka mencapai Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

- (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global,
- (2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat,
- (3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja,
- (4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dan
- (5) Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam mendukung 5 (lima) arahan Presiden sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, yaitu **(1)** Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, **(2)** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, **(3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, **(4)** Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, **(5)** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, **(6)** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta **(7)** Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pembangunan kesehatan di tahun 2023 masuk ke dalam Agenda Pembangunan (3), ‘*meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing*’ melalui Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Program Prioritas (PP) Pembangunan kesehatan Tahun 2023 adalah

‘**Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan**’, terdiri atas 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP) yaitu : (1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan produksi, (2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat, (3) Peningkatan pengendalian penyakit, (4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta (5) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Arah kebijakan pembangunan Kesehatan Tahun 2023 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama keberlanjutan penguatan sistem kesehatan dan *health security*, penguatan pelayanan kesehatan ibu, KB, dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan gizi didukung dengan upaya promotif dan preventif serta digitalisasi pelayanan kesehatan. Tiga fokus pembangunan kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Fokus Pembangunan Kesehatan Tahun 2023

Reformasi Sistem Kesehatan	Percepatan Penurunan Kematian Ibu	Percepatan Penurunan Stunting
• Pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan • Penguatan Puskesmas	• Pengembangan sistem rujukan maternal • Ketersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan gawat darurat maternal	• Penajaman intervensi spesifik dan sensitive • Ketersediaan obat gizi dan makanan tambahan
• Peningkatan RS dan pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)	• Penguatan deteksi dini faktor risiko ibu hamil	• Ketersediaan obat penyakit tropis terabaikan
• Kemandirian farmasi dan alat kesehatan	• Pemenuhan sarana PONEK dan PONED	• Investasi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
• Ketahanan kesehatan (<i>health security</i>)	• Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan serta ketersediaan darah setiap waktu	• Penguatan tatalaksana gizi buruk
• Pengendalian penyakit dan imunisasi	• KB pasca salin	• Akses air minum dan sanitasi layak
• Teknologi informasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat	• Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pelayanan Kesehatan reproduksi remaja	• Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
• Vaksinasi COVID-19		

RKP Bidang Kesehatan Tahun 2023 disusun dengan pendekatan *money follow program*, pengendalian program sampai ke level proyek, penajaman integrasi dan sumber pendanaan, serta pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Sasaran

pembangunan kesehatan Tahun 2023 dalam RKP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Kesehatan Tahun 2023

Sasaran/Indikator	Target
<i>Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak</i>	
1. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	205
2. Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	18.6
<i>Meningkatnya kesehatan reproduksi</i>	
3. Prevalensi pemakaian kontrasepsi cara modern (mCPR) (%)	62.5
4. Unmet need KB (%)	8.0
5. ASFR 15-19 tahun (per 1.000 perempuan)	21
<i>Meningkatnya status gizi masyarakat</i>	
6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16.0
7. Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	7.5
<i>Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan factor risiko penyakit tidak menular</i>	
8. Insidensi TB (per 100.000 penduduk)	211
9. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV)	0.19
10. Eliminasi malaria (kab/kota)	385
11. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	8.9
12. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)	21,8
<i>Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas</i>	
13. Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	71
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terakreditasi (%)	80
15. RS terakreditasi (%)	95
16. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	71
17. Puskesmas tanpa dokter (%)	0
18. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	94
19. Obat memenuhi syarat (%)	86.6
20. Makanan memenuhi syarat (%)	82
<i>Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk</i>	
21. Cakupan kepesertaan JKN (%)	87
22. Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) JKN (juta jiwa)	110.0

Dalam menjamin sinergisme program pembangunan nasional dan daerah, maka program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan kesehatan pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai **Urusan Kesehatan** pemerintahan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2023

No.	Kinerja	Indikator Provinsi	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas tata Kelola rumah sakit rujukan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1 : 1000 rasio penduduk	Disesuaikan dengan besaran target hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah
		Persentase rumah sakit rujukan Provinsi yang terakreditasi	90%	
2.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	
3.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	205 per 100.000	
		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	15%	
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan	91%	
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	18.4%	
		Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita	7.5	
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	231 per 100.000	
		Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak re-infeksi HIV	0.19	
		Temuan kasus TB Baru menggunakan indikator SPM 100% (terduga TB)	90%	
		<i>Treatment coverage</i> pada pasien TB	90%	
		Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada usia 12-23 bulan	71%	
		Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	59%	
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	365 kab/kota	
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8.9%	
		Jumlah kabupaten/kota dengan $\geq 40\%$ FKTP yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	40%	
		Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	90%	
		Jumlah griya sehat di kab/kota	60 kab/kota	

4.	Meningkatnya efektivitas dan cakupan pengawasan perizinan berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	80%	
		Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan perizinan	90%	
		Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional sesuai standar	49%	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 mencuplik tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Renja PD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	79.40	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu	- Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas - Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada calon pengantin dan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) - Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/ lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	2.2	Meningkatkan pelayanan kesehatan anak	- Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana kesehatan bayi baru lahir (neonatal), bayi, balita, dan anak - Peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan bayi baru lahir (neonatal) bayi, balita, dan anak - Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/ lintas sektor dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir (neonatal), bayi, balita, dan anak - Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi serta penguatan PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi)

Meningkatnya status gizi masyarakat	Persentase balita <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	26.50	Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat	- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan gizi masyarakat - Peningkatan pendidikan gizi - Peningkatan surveilans gizi - Peningkatan suplementasi gizi
Menurunnya angka kesakitan	Angka kesakitan (morbiditas)	12.20	Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	- Penguatan surveilans dan karantina kesehatan serta penanggulangan wabah dan bencana - Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan vektor penyakit - Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa - Peningkatan Vaksinasi COVID-19 dan upaya 3T: <i>testing, tracing, dan treatment</i> COVID-19
			Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	- Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), dan fasilitas pelayanan kesehatan - Implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di seluruh desa/ kelurahan - Implementasi tatanan kawasan sehat di semua kab/ kota
			Meningkatkan perilaku hidup sehat	- Peningkatan Germas dan PHBS di semua tatanan - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan
			Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan laboratorium kesehatan - Peningkatan pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit dan <i>Public Safety Center</i> (PSC) - Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan - Peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut - Peningkatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
			Meningkatkan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	- Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan - Peningkatan pengolahan pasca panen tanaman obat
			Meningkatkan mutu tenaga kesehatan	- Perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan SDM kesehatan - Peningkatan kualitas institusi penyelenggara pelatihan Kesehatan

Meningkatkan kebijakan dan manajemen kesehatan	• Penguatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian • Peningkatan tata kelola Sistem Informasi Kesehatan • Peningkatan humas dan hukum kesehatan • Peningkatan kemitraan dan kolaborasi LP/LS dalam pembangunan kesehatan
--	---

3.3 Tujuan, Sasaran dan Rencana Aksi Pelaksanaan, serta Target KSD

Sebagai salah satu strategi dalam mencapai keberhasilan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan 54 (lima puluh empat) Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dalam mendukung pencapaian 8 (delapan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Terdapat 7 (tujuh) KSD pada Prioritas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, dimana 2 (dua) KSD diantaranya diampu oleh RSUD Haji Medan dan RS Jiwa Prof. dr. M. Ildrem (masing-masing satu KSD). Dengan demikian, terdapat 5 (lima) KSD yang diampu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yaitu (1) Penanganan COVID-19 melalui Penguatan Pola 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat-obatan, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit dan Pemberian Insentif bagi Tenaga Medis, (2) Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Balita Kurus, dan Anak Sekolah Sebanyak 250.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu*), (3) Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Melalui Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Masyarakat di 33 Kabupaten/Kota, (4) Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi kepada Masyarakat Kurang Mampu Sebanyak 420.000 (*Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) Jiwa dan Penyediaan Kontribusi bagi Peserta PBI JKN Sebanyak 4.733.689 (*Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), dan (5) Layanan Kesehatan Bergerak Melalui Pengadaan 8 (Delapan) Unit Mobil Medis/Bus Kesehatan.

Kelima KSD yang diampu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat memiliki daya ungkit untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan publik di bidang kesehatan, yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Rencana Aksi Pelaksanaan, dan Target KSD Bidang Kesehatan

No.	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Tujuan	Sasaran	Rencana Aksi Pelaksanaan	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3T (Testing, Tracing, Treatment) Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat-Obatan, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis	Menurunnya kasus COVID-19 dan meningkatnya cakupan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara	Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19, pasien COVID-19, masyarakat sasaran vaksinasi COVID-19, RS Rujukan Penanganan Pasien COVID-19, Laboratorium Pemeriksaan COVID-19, Dinkes/RSUD	• Penguatan upaya 3T: <i>testing</i>, <i>tracing</i>, dan <i>treatment</i> • Penyediaan obat/vitamin, BHP, BMHP, Alkes dan operasional RS Rujukan Penanganan Pasien COVID-19/ Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 • Pengawasan limbah medis fasilitas kesehatan • Pengawasan ketersediaan oksigen di RS • Penyediaan insentif tenaga Kesehatan penanganan COVID-19 • KIE COVID-19 • Fasilitasi/ supervisi/ koordinasi penanganan COVID-19 • Dukungan vaksinasi COVID-19 melalui Pos Vaksinasi/ Mobile Vaksinasi	Persentase kasus aktif dan Angka Kematian (CFR) di bawah Nasional. BOR RS di bawah 60%. Persentase kasus sembuh, cakupan vaksinasi COVID-19 di atas Nasional
2.	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Balita Kurus, dan Anak Sekolah sebanyak 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa dalam Rangka Penurunan Prevalensi Stunting	Tersedianya suplementasi gizi dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK, balita kurus, dan anak sekolah dalam rangka memenuhi konsumsi harian sesuai kebutuhan berdasarkan angka kecukupan gizi	Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita kurus, dan anak sekolah	• Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK • Penyediaan PMT balita kurus	45.275 ibu hamil KEK 81.293 balita kurus
3.	Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) Melalui Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Masyarakat di 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Meningkatnya aktivitas fisik, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi, pencegahan dan deteksi dini penyakit, kualitas lingkungan, dan edukasi hidup sehat	Masyarakat Provinsi Sumatera Utara	• Edukasi gizi seimbang (makan buah dan sayur) di semua tatanan • Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) GERMAS melalui berbagai media	33 Kab/Kota
4.	Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Kepada Masyarakat Kurang Mampu Sebanyak 420.000 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu) Jiwa dan Penyediaan Kontribusi Bagi Peserta PBI JKN Sebanyak 4.733.689 (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan) Jiwa	Meningkatnya cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan terlindunginya masyarakat miskin dan/atau tidak mampu Provinsi Sumatera Utara dari beban finansial akibat penyakit katastropik	Masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang miskin dan/atau tidak mampu yang diusulkan oleh Bupati/Walikota/ Instansi terkait	• Penyediaan pembiayaan premi PBPU/BP yang didaftarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PBI Provinsi) • Penyediaan pembiayaan kontribusi iuran premi PBI JKN • Penyediaan pembiayaan kesehatan bagi non-register	420.000 jiwa 4.733.689 jiwa

No.	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Tujuan	Sasaran	Rencana Aksi Pelaksanaan	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Layanan Kesehatan Bergerak Melalui Pengadaan 8 (Delapan) Unit Mobil Medis/Bus Kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil, sangat terpencil, tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, dan tidak mendapat pelayanan kesehatan	Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil	Jumlah mobil medis/bus kesehatan dan/atau kendaraan operasional/lapangan	2 (dua) unit

3.4 Program dan Kegiatan

Program yang diusulkan dalam Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 mencakup 1 (satu) program pendukung dan 4 (empat) Program Utama sebagaimana terdapat pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Program pendukung dan program utama pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sebagai berikut:

- *Program Pendukung*
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- *Program Utama*
 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 diusulkan dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2023 ini memedomani program/kegiatan/sub kegiatan yang terdapat pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023.

Kerangka pendanaan dan anggaran pada Renja PD ini telah sedapat mungkin melalui proses perhitungan yang cermat dalam rangka pencapaian target kinerja setiap indikator program/kegiatan, dengan berpedoman pada Standar Satuan Harga (SSH) yang terdapat pada aplikasi SIPD. Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan pendanaan yang diusulkan dapat menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan, yang selanjutnya dapat memengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1. Target Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)
Indikator Kinerja Utama (IKU)		
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	67,39
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	2,22
3.	Prevalensi balita <i>Stunting</i>	26,5%
4.	Angka Kesakitan	12,20%
Indikator Kinerja Kunci (IKK)		
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2.	Prevalensi stunting pada balita	26,50%
3.	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan per 1.000 penduduk	1,5
4.	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%
5.	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100%
6.	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (Sembilan) jenis tenaga kesehatan	50%
7.	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	100%
8.	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	75%

4.2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Jumlah, nomenklatur, pagu anggaran dan indikator program/kegiatan/sub kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 telah konsisten dengan jumlah, nomenklatur, pagu anggaran dan indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

Rencana Kerja dan pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 bersumber APBD Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dapat dilihat pada *Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024* terlampir.

Selain melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan bersumber APBD, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023 juga melaksanakan program dan kegiatan bersumber APBN Dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan RI. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor PR.04.01/I/6655/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Hal Pagu Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan TA. 2023, anggaran APBN Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 berjumlah Rp. 22.311.790.000,00 (*Dua puluh dua milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Distribusi Pagu APBN Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023 per Program
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

No.	Program	Pagu (Rp.)
1.	Kesehatan Masyarakat	7.679.607.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan dan JKN	2.840.680.000,00
3.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.184.582.000,00
4.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6.260.503.000,00
5.	Dukungan Manajemen	3.346.418.000,00
J u m l a h		22.311.790.000,00

Program Kesehatan Masyarakat (024.01.DD) meliputi Penguatan Kesehatan masyarakat di Provinsi; Pelatihan bidang kesehatan (integrasi layanan primer/manajemen laboratorium kesehatan masyarakat/Tatalaksana Program Kesehatan Jiwa/Upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir/Upaya perbaikan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita/Perbaikan status gizi dan pemberian TTD bagi remaja/Surveilans gizi dan KIA/Pelayanan kesehatan reproduksi Catin dan KB); Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; serta Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Daerah.

Program Pelayanan Kesehatan dan JKN (024.01.DG) meliputi Penguatan pelayanan kesehatan di Provinsi; Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Daerah; Fasilitasi dan pembinaan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan di daerah.

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (024.01.DL) meliputi Pelatihan bidang Kesehatan (Pelatihan surveilans epidemiologi/Pelatihan 9 penyakit prioritas).

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (024.01.DO) meliputi Pelatihan bidang kesehatan; Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Daerah; Pelayanan publik lainnya (Layanan kesehatan haji daerah).

Program Dukungan Manajemen (024.01.WA) meliputi Pengelolaan keuangan negara; Perencanaan dan penganggaran; Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; Data dan informasi.

BAB V

Penutup

Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini disusun melalui berbagai tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja PD ini juga disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis Nasional dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2023, isu-isu strategis daerah, serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2017, serta nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Dalam penyusunannya, diperhatikan prinsip-prinsip yang menjamin keserasian, efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana yang tersedia.

Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Kita berharap, program/kegiatan yang tercantum dalam Renja PD ini dapat berkontribusi dalam pencapaian visi ***Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat*** serta misi ***Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki kesehatan yang prima.***

Medan, Agustus 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara,



drg. ISMAIL LUBIS, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710204 200003 1 002



Lampiran

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA OPD LINGKUP PROVINSI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
 PERIODE PELAKSANA : 2022

No	Kode	Usuran Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																I				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17				
		TUJUAN																		
		SASARAN																		
		STRATEGIS/INDIKATOR																		
		KINERJA UTAMA																		
			1. Umur Harapan Hidup (UHH)	69.5 Tahun 67.39	69.23 Tahun 88.18	69.35 Tahun 79.40		69.35 Tahun 12.21			69.35 Tahun 12.21		69.35 Tahun 12.21		99.78					
			1. Angka Kematian ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	2.22	2.28	2.32		0.63			0.63		0.63		97.30					
			3. Persentase Balita Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	26.50%	25.80%	27.50%		25.80%			25.80%		25.80%		102.64					
			4. Angka Kesakitan (Morbiditas)	12.20%	8.78%	12.22%		8.78%			8.78%		8.78%		128.03					
		BELANJA																		
		URUSAN WAJIB																		
		PROGRAM PENUNJANG																		
		URUSAN PEMERINTAHAN																		
		DAERAH PROVINSI																		
		Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peningkat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun Outcome : - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun Output : - Persentase Pemenuhan layanan administrasi	66 Dok	40 Dok	13 Dok	8 Dok	309,194,150 Dok			390,912,750 Dok	85%	51 Dok	390,912,750 Dok	77.27		Dinkes Provusu			
		01.1.01.01																		
		01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	66 Dok	40 Dok	13 Dok	8 Dok	10,980,000 Dok			231,757,380,639 Dok	85%	51 Dok	10,980,000 Dok	77.27		Dinkes Provusu			
		01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -	66 Dok	40 Dok	13 Dok	8 Dok	10,980,000 Dok			231,757,380,639 Dok	85%	51 Dok	10,980,000 Dok	77.27		Dinkes Provusu			
		01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -	66 Dok	40 Dok	13 Dok	8 Dok	10,980,000 Dok			231,757,380,639 Dok	85%	51 Dok	10,980,000 Dok	77.27		Dinkes Provusu			
		01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -	66 Dok	40 Dok	13 Dok	8 Dok	10,980,000 Dok			231,757,380,639 Dok	85%	51 Dok	10,980,000 Dok	77.27		Dinkes Provusu			

No	Kode	Usuran Bidang/Usuran Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)				Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp</

No	Kode	Usuran Bidang/Usuran Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																				I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17							
4	01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun Outcome : - Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun Output : - Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian - Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara	5 Dok	3 Dok	1 Dok	0	1 Dok	90,409,481		1 Dok	109,909,481	125%	13,04	25,00	Dinkes Provsu							
	01.1.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		5 Dok	3 Dok	1 Dok	0	1 Dok	7,200,000		1 Dok	12,220,000	125%	55,57	25,00	Dinkes Provsu							
							0	1 Dok															
	01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		5 Dok	3 Dok	1 Dok	0	1 Dok	4,200,000		1 Dok	13,570,000	100%	44,01	20,00	Dinkes Provsu							
								0															
	01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		5 Dok	3 Dok	1 Dok	0	1 Dok	45,600,000		1 Dok	5,020,000	100%	11,01	25,00	Dinkes Provsu							
	01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		5 Dok	3 Dok	1 Dok	0	1 Dok	680,907,000		1 Dok	60,607,481	100%	8,90	25,00	Dinkes Provsu							
	01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		5 Dok	3 Dok	1 Dok	0	1 Dok	53,820,000		1 Dok	14,292,000	100%	26,56	25,00	Dinkes Provsu							
5	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Umum yang Disusun Outcome : - Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun Output : - Jumlah UPT yang dilakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Dok	3 Dok	1 Dok	0	1 Dok	604,409,828		0	2,759,315,699	25%	50,57	5,00	Dinkes Provsu							
	01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5 Dok	3 Dok	1 Dok	0		399,624,920			163,659,445	25%	40,95	5,00	Dinkes Provsu							
							3 Bulan	3 Bulan															
	01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		5 Dok	3 Dok	1 Dok	0		1,183,941,078		0	395,355,000	25%	33,39	5,00	Dinkes Provsu							

No	Kode	Usuran Bidang/Usuran Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Trivulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				100%		100%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17											
			- Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Output : - Jumlah mebel yang tersedia	100%		1,213,231,025	-	25%	26,862,000		50%	26,862,000	50%	2,21	50%	26,862,000	50.00					50.00		Dinkes Provisu			
01.1.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Output : - Jumlah laptop dan pinter yang tersedia	100%		417,012,742	-	25%	153,220,050		50%	153,220,050	50%	36.74	50%	153,220,050	50.00					50.00		Dinkes Provisu			
01.1.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Output : - Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	100%		916,863,350	-	25%	109,650,000		50%	109,650,000	50%	11.96	50%	109,650,000	50.00					50.00		Dinkes Provisu			
6	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Umum yang Disusun	5 Dok		18,780,107,100	2,030,284,153	0	4,565,989,405	-	0	6,596,273,558	25%	35.12	25%	6,596,273,558	5.00					5.00		Dinkes Provisu			
01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Outcome : - Jumlah Dokumen Umum yang Disusun Output : - Jumlah kebutuhan surat menyurat	5 Dok		44,595,000	22,912,000	0	8,100,000		0	31,012,000	25%		25%	31,012,000	5.00					5.00		Dinkes Provisu			
01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome : - Jumlah Dokumen Umum yang Disusun Output : - Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	5 Dok		4,039,138,500	718,799,593	0	776,693,422		0	1,495,493,015	25%	37.03	25%	1,495,493,015	5.00					5.00		Dinkes Provisu			
01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Outcome : - Jumlah layanan umum kantor yang disediakan jumlah unit kerja yang disediakan jasa keamanan Output : - Jumlah Layanan Umum Kantor yang disediakan	5 Dok		14,696,383,600	1,288,572,560	0	3,781,195,983		1 Dok	5,069,768,543	100%	34.50	1 Dok	5,069,768,543	25.00					25.00		Dinkes Provisu			
7	01.1.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	15 Layanan		16,647,117,513	443,803,038	0	1,289,763,806		0	1,733,566,844	8%	10.41	25%	1,733,566,844	1.67					1.67		Dinkes Provisu			
01.1.09.01		Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Outcome : - Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Output : - Jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	15 Layanan		1,214,420,000	38,344,720	1 Layanan	236,711,898		2 Layanan	275,056,618	67%	22.65	2 Layanan	275,056,618	13.33					13.33		Dinkes Provisu			
								1 Unit			2 Unit	33%		2 Unit													

No	Kode	Usuran Bidang/Usuran Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi Periode Renstra OPD Provinsi		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8÷9 x 10÷11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6÷12		15 = 14/5 x 100%		16	17
	01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Outcome : - Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Output : - Jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	15 Layanan		9 Layanan		3 Layanan 167 Unit	1,463,566,000	1 Layanan 50 Unit	347,326,318	1 Layanan 50 Unit	358,826,708					2 Layanan 100 Unit	706,153,026	67%	48.25	2	706,153,026	13.33		Dinkes Provsu	
	01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : - Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Output : - Jumlah layanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15 Layanan		9 Layanan		3 Layanan 10 Layanan	863,600,000	1 Layanan 3 Layanan	49,475,000	1 Layanan 3 Layanan	467,421,000					2 Layanan 6 Layanan	516,896,000	67%	59.85	2 Layanan	516,896,000	13.33		Dinkes Provsu	
	01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Outcome : - Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Output : - Jumlah perawatan sedang gedung negara jumlah relab plafon	15 Layanan		9 Layanan		3 Layanan 165 M2	13,020,261,513	1 Layanan 0	8,667,000	1 Layanan 0	220,804,200					2 Layanan 0	229,461,200	67%	1.76	2 Layanan	229,461,200	13.33		Dinkes Provsu	
	01.1.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Prasarana	Outcome : - Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Output : - Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15 Layanan		9 Layanan		3 Layanan 7 Unit	85,250,000	1 Layanan 0		1 Layanan 0	6,000,000					2 Layanan 0	6,000,000	67%	7.04	2 Layanan 0	6,000,000	13.33		Dinkes Provsu	
Rata-rata capaian kinerja (%)									179,260,344,716	0	17,554,954,298							0	17,554,954,298	0%	9.79		17,554,954,298	#DIV/0!			
Predikat kinerja																											
II	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							369,040,006,060		12,762,736,252		121,306,751,733					36.33	134,069,487,985		36.33		134,069,487,985				
1	02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan					300 Paket	34,845,291,944	0	15,000,000	11 Paket	1,228,644,110					11 Paket	1,243,644,110	4%	3.57	11 Paket	1,243,644,110			Dinkes Provsu	
	02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine,dll)	Outcome : - Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di DTPK Output : - Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang dilakukan	60%		30%		55%	8,791,285,680	35%		35%	896,720,172					35%	896,720,172	64%	10.20	35%	896,720,172	58.33		Dinkes Provsu	
	02.1.01.10	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Outcome : - Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT, RS Khusus Paru - Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT, RS Khusus Mata	95%		94.11%		90%	473,888,643	-								0%		0%	0.00	0.00%		0.00		Dinkes Provsu	

No	Kode	Usuran Bidang/Usuran Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp</

No	Kode	Usuran Bidang/Usuran Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (%)			Unit/OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																								I				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17												
		Kesehatan	- Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi - Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk yang terdampak penyakit infeksi emerging - Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana - Persentase kabupaten/kota yang merespon alert SKDR minimal - Angka Non Acute Flaccid Paralysis (AFP) per 100.000 anak usia <15 tahun Output : - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	K 100%	Rp 100%	K 100%	Rp 186.213,000	K 100%	Rp 26.330,000	K 100%	Rp 26.330,000	K 100%	Rp 14.14	K 100%	Rp 100,00	Dinkes Provisu												
				95%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	111%	100,0%	100,0%														
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%														
				80%	nla	70%		0%				0%	0,0%	0,0%														
				≥ 2	0,21	≥ 2		0%				0%	0,0%	0,0%														
02.1.02.18		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Outcome : - Jumlah dokumen kerja sama program, lintas sektor, dan antar daerah dalam bidang kesehatan Output : - Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	35 Dok	? Dok	7 Dokumen	335.905.000	1 Dokumen			-	0%	0,00	0	0,00	Dinkes Provisu												
02.1.02.19		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Outcome : - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar - Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dengan Pendekatan Keluarga - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rawat Inap yang Menerapkan Pelayanan Kegawatdaruratan Output : - Jumlah dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	75% 60% 100%	49,59% 31,79% 100%	65% 50% 100% 1 Dokumen	494.997.000	60% 31,79% 100%	57,72% 31,79% 100%	122.376.900	57,72% 31,79% 100%	89% 63,58% 100,00%	57,7% 31,8% -	76,96 52,98 0,00	Dinkes Provisu													
02.1.02.20		Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Outcome : - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Output : - Jumlah dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	75%	? 1 Dokumen	65% 1 Dokumen	123.213,700	60% 57,72%			57,72%	89%	57,7%	-	76,96	Dinkes Provisu												
02.1.02.21		Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh	Outcome : - Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	94,6%	80,70%	94%	105.608.000	94%			23,20%	25%	23,2%	-	24,52	Dinkes Provisu												

No	Kode	Usuran Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	KabupatenKota	4 - Jumlah Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan Output : - Jumlah Dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	30 KIK		?		29 Kabikota 1 Dokumen		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%	16	17
02.1.02.22		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Outcome : - Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata - Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru - Persentase kesembuhan pasien Kusta di UPT. RS Kusta Lausimomo - Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Indrapura Output : - Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	95% 95% 100% 85% 95%		85% 92% 26% 84% 69%		90% 90% 100% 90% 90%	10.521.109.211	2.421.552.593	1.137.008.072						-	3.558.560.665	0% 0% 0% 0% 0%	33.82 						

No	Kode	Usuan Bidang/Utusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Trivulanan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12 = 8÷9÷10÷11	13 = 127 x 100%	14 = 6 x 12	15 = 145 x 100%	16	17										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya anggaran yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan dan koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Akibat pandemi Covid – 19, masih ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang pelaksanaannya tidak maksimal akibat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tiwulan berikutnya* : Melaksanakan kegiatan rapat, koordinasi dan pembinaan dengan kabupaten/kota secara daring (media online/zoom meeting)																											

DISUSUN,
MEDAN,
JULI 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,


dr. ISMAIL LUBIS, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197020 200003 1 002,

DIEVALUASI
MEDAN,
JULI 2022

PLT. KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dr. Ir. HASMIRZAL LUBIS, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670622 199303 1 011

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												504,455,651,940
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												26,058,861,931
1	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												786,500,000
				Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas		100 % 100 %	2 Dokumen	13 Dokumen	525,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 % 100 %	577,500,000	
				Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas		100 % 100 %	1 Dokumen	13 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 % 100 %	27,500,000	
				Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas		100 % 100 %	2 Dokumen	13 Dokumen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 % 100 %	49,500,000	
				Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas		100 % 100 %	1 Dokumen	13 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 % 100 %	27,500,000	
				Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas		100 % 100 %	2 Dokumen	13 Dokumen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 % 100 %	49,500,000	
				Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas		100 % 100 %	6 Laporan	13 Dokumen	51,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 % 100 %	55,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		
1	02	01	1.01	07	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pernacanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas	100 % 100 %	4 Laporan	13 Dokumen	937,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 % 100 %	0	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									462,793,100	
1	02	01	1.02	01	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Keuangan yang Berkualitas	100 %	950 Orang/ Bulan	3 Dokumen	129,814,201,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.02	02	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Keuangan yang Berkualitas	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	1,194,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.02	03	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Berkualitas	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	133,991,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	147,390,100
1	02	01	1.02	04	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Berkualitas	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	27,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.02	05	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Berkualitas	100 %	2 Laporan	3 Dokumen	14,025,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.02	06	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Keuangan yang Berkualitas	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	153,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	168,476,000
1	02	01	1.02	07	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Berkualitas	100 %	18 Laporan	3 Dokumen	133,570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	146,927,000
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									377,602,875	
1	02	01	1.03	01	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang) yang Berkualitas	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	3,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	5,175,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang) yang Berkualitas		100 %	1 Laporan	5 Dokumen	18,465,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	20,045,750
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang) yang Berkualitas		100 %	1 Laporan	5 Dokumen	27,264,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	44,252,125
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang) yang Berkualitas		100 %	1 Laporan	5 Dokumen	18,585,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	19,350,000
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang) yang Berkualitas		100 %	1 Laporan	5 Dokumen	272,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	288,780,000
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5,030,738,000				5,130,910,750
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Berkualitas		100 %	950 Paket	1 Dokumen	1,491,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,176,661,550
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Berkualitas		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	30,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	34,914,000
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Berkualitas		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	61,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	70,472,000
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Berkualitas		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	194,588,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	223,766,200
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Berkualitas		100 %	200 Orang	1 Dokumen	3,070,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	3,500,000,000
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Berkualitas		100 %	300 Orang	1 Dokumen	108,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	125,097,000
1	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Berkualitas		100 %	25 Orang	1 Dokumen	73,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja				
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										3,016,062,381			
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen	98,735,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen	473,544,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	544,585,613	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen	131,465,119	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	151,192,378	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen	48,482,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	63,027,340	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	55,754,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0	
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	356,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	419,124,000	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	1,064,492,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,288,133,050	
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	501,095,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	550,000,000	
1	02	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										12,930,541,550		309,362,500	
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	2 Unit	1 Dokumen	10,850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	1 Paket	1 Dokumen	561,530,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	35 Unit	1 Dokumen	419,010,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	309,362,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana			
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		96 % 60 %	2 Layanan	1 Dokumen	7,987,499,847	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase Puskesmas yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)	96 % 60 %	8,500,000,000
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		96 % 60 %	1 Dokumen	1 Dokumen	404,605,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase Puskesmas yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)	96 % 60 %	0
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		96 % 60 %	1 Paket	1 Dokumen	3,089,238,461	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase Puskesmas yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)	96 % 60 %	3,398,162,307
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							317,905,985,345				432,879,122,481
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Angka keberhasilan pengobatan penyakit TB (success rate) Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan pelayanan balita sesuai standar Cakupan pelayanan nifas Persentase anak usia Pendidikan dasar yang	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 26,5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0 Orang	17 Dokumen	1,796,032,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka keberhasilan pengobatan penyakit TB (success rate) Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Cakupan pelayanan balita sesuai standar Cakupan pelayanan nifas	100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 26,5 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1,975,635,200

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023				Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
Target Capaian Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Sumber Dana						
Program	Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	Program	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target
100 % 100 %					Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Kesehatan (SPA) Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	100 % 100 %	100 % 100 %	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023				Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja					
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sumber Dana		
	Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode				Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah dokumen hasil standarisasi dan klasifikasi rumah sakit dan fasyankes	78 %	2 Unit	40 Unit	548,697,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Persentase RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	78 % 100 % 90 % 95 % 95,3 % 90 %	603,566,700
								100 %					Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang melaksanakan pelayanan Kesehatan sesuai standar		
								90 %					Persentase Fasyankes yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)		
								95 %					Persentase FKTP yang terakreditasi		
								90 %					Persentase RS Pemerintah (Non BUMN/TNIPolri) yang terakreditasi		
													Persentase Rumah Sakit yang menerapkan standarisasi klasifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	1 Persentase RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang melaksanakan pelayanan Kesehatan sesuai standar Persentase Fasyankes yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase RS Pemerintah (Non BUMN/TNIPolri) yang terakreditasi Persentase Rumah Sakit yang menerapkan standarisasi klasifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jumlah dokumen hasil standarisasi dan klasifikasi rumah sakit dan fasyankes	78 %						1 Persentase RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang melaksanakan pelayanan Kesehatan sesuai standar Persentase Fasyankes yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) Persentase FKTP yang terakreditasi yang terakreditasi Persentase RS Pemerintah (Non BUMN/TNIPolri) yang terakreditasi Persentase Rumah Sakit yang menerapkan standarisasi klasifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	78 % 100 % 90 % 95 % 95,3 % 90 %	78 % 100 % 90 % 95 % 95,3 % 90 %	2,416,949,700

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target
1	02	03	1.02	01	Persentase tenaga Kesehatan yang dilatih pada pelatihan Kesehatan terakreditasi Persentase tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDMk		3 % 30 %	60 Orang	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tenaga Kesehatan yang dilatih pada pelatihan Kesehatan terakreditasi Persentase tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	3 % 30 %	3,594,787,520	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										2,253,265,790	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)										1,355,627,000	1,491,189,700
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan PBF Cabang dan PAK Cabang	100 %	10 Sarana	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	100 %	1,491,189,700	
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)										692,796,445	762,076,090
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan perizinan	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan UKOT yang dibina dan diawasi	100 %	10 Sarana	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan perizinan	100 %	762,076,090	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										9,176,460,928	11,007,867,625
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi										1,001,802,928	1,500,000,000
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang melaksanakan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan GERMAS di Kabupaten/Kota	75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kab/kota yang melaksanakan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	75 %	1,500,000,000	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi										4,762,953,000	5,539,248,300
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Program PHBS	69 %	1 Dokumen	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	69 %	5,539,248,300	
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi										3,411,705,000	3,968,619,325
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase desa/kelurahan siaga aktif Persentase Posyandu aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan UKBM	50 % 59 %	1 Dokumen	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa/kelurahan siaga aktif Persentase Posyandu aktif	50 % 59 %	3,968,619,325	
											TOTAL	530,604,079,195				504,455,651,940

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT. Rumah Sakit Khusus Mata

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja											
							Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											28,887,885,777							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											14,053,754,375							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											118,200,000							
1	02	01	1.02	01	1.02	02												
1	02	01	1.02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Keuangan yang Berkualitas	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0	
1	02	01	1.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah										745,265,703	
1	02	01	1.06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	78,718,013	
1	02	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	367,892,866	
1	02	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	91,407,674	
1	02	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	154,398,750	
1	02	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	11,088,000	
1	02	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	41,760,400	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										11,133,071,600	256,378,760		
1	02	01	1.07	05			Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	1 Paket	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	169,203,760	
1	02	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	1 Unit	1 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	87,175,000	
1	02	01	1.07	07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	1 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT. Rumah Sakit Khusus Mata

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	1 Unit	1 Dokumen	850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemuhan layan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,168,022,350
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen plumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitaselayanan umum yang berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	3,355,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemuhan layan administrasi	100 %	3,690,500
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah dokumen plumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitaselayanan umum yang berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemuhan layan administrasi	100 %	550,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen plumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitaselayanan umum yang berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	558,483,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemuhan layan administrasi	100 %	614,331,850
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,063,130,000
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	33,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemuhan layan administrasi	100 %	33,470,000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinananya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	4 Unit	1 Dokumen	100,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemuhan layan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	79,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemuhan layan administrasi	100 %	87,175,000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	850,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemuhan layan administrasi	100 %	935,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										14,834,131,402
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										7,514,251,841
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	95 %	1 Layanan	1 Dokumen	519,907,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata	95 %	571,898,008

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT. Rumah Sakit Khusus Mata

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sumber Dana	Tolok Ukur	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	95 %	1 Unit	1 Dokumen	6,994,344,561	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata	95 %	0	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						7,069,879,561				7,776,867,517	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7,069,879,561	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata	95 %	7,776,867,517	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						250,000,000				275,000,000	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan			1 Unit		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275,000,000	
											TOTAL	28,887,885,777				11,849,077,338

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. Rumah Sakit Khusus Paru

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur		Target
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												26,849,349,749
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												2,002,552,800
1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												188,892,000
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	171,720,000				188,892,000	
1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas		100 %	1 Paket	1 Dokumen	79,631,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas		100 %	1 Paket	1 Dokumen	115,901,156	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas		100 %	1 Paket	1 Dokumen	177,158,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas		100 %	1 Paket	1 Dokumen	250,737,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	10,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas		100 %	0 Laporan	1 Dokumen	196,986,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah		100 %	1 Paket	1 Dokumen	616,527,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah		100 %	74 Unit	1 Dokumen	727,155,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,353,140,800
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitas		100 %	1 Laporan	1 Dokumen	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,200,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. Rumah Sakit Khusus Paru

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	451,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	899,940,800
1	02	01	1.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										460,520,000
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	33,470,000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	4 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	127,050,000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	150,000,000
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	150,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										25,877,560,285
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										18,239,563,059
					Pengembangan Rumah Sakit	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	95 %	1 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	95 %	5,500,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. Rumah Sakit Khusus Paru

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana				
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)			
1	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	95 %	1 Unit	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	95 %	0	
1	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	95 %	1 Layanan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	95 %	0	
1	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	95 %	77 Unit	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	95 %	12,045,000,000	
1	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	95 %	1 Paket	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	95 %	0	
1	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	95 %	2 Unit	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	95 %	0	
1	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	95 %	1 Unit	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	95 %	0	
1	02	1.02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							6,387,997,226			7,026,796,949		
1	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen La	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	95 %	7,026,796,949	
1	02	1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							1,000,000,000			0			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. Rumah Sakit Khusus Paru

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan SIK secara Terintegrasi	95 %	1 Unit	1 Dokumen	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru	95 %	0	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						250,000,000				275,000,000	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan			1 Unit		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275,000,000	
TOTAL											30,002,964,561				26,849,349,749	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												6,816,619,864		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												3,225,660,157		
1	02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												417,975,800		
1	02	01	1.02	01	1.02	02				100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	417,975,800	
1	02	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah												406,983,501		
1	02	01	1.06	01	1.06	01	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	02	1.06	02	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	176,785,736
1	02	01	1.06	03	1.06	03	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	208,214,265
1	02	01	1.06	05	1.06	05	Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	06	1.06	06	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.06	08	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	21,983,500
1	02	01	1.06	09	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												485,100,000		
1	02	01	1.07	05	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	5 Paket	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	320,100,000
1	02	01	1.07	06	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	3 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	165,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	10 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,236,840,000
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	6,600,000
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	660,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	570,240,000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										615,533,960
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	38,490,500
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	3 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	73,634,000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	132,000,000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	434,636,356
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										5,484,670,643
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										2,495,860,250
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Kusta Lausimomo	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	90 %	1 Unit	1 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Kusta Lausimomo	90 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	90 %	6 Unit	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Kusta Lausimomo	90 %	0	
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	90 %	3 Unit	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Kusta Lausimomo	90 %	132,110,000	
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	90 %	1 Paket	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Kusta Lausimomo	90 %	35,000,000	
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	90 %	9 Unit	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Kusta Lausimomo	90 %	136,158,275	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						2,738,810,393				3,012,691,432	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Kusta Lausimomo	90 %	3,012,691,432	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						250,000,000				275,000,000	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan			1 Unit			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275,000,000	
TOTAL											11,798,997,303				6,816,619,864	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT. Laboratorium Kesehatan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	9,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	10,450,000
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	530,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	583,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	308,958,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	339,854,240
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										393,664,500
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	33,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	33,470,000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	2 Unit	1 Dokumen	66,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	66,940,000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	266,595,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	293,254,500
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										7,284,583,753
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										5,909,583,753
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	84,5 %	1 Layanan	1 Dokumen	550,525,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. Laboratorium Kesehatan	84,5 %	605,578,556
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana,, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	84,5 %	1 Unit	1 Dokumen	8,716,406,851	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. Laboratorium Kesehatan	84,5 %	5,304,005,197
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi										1,100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT. Laboratorium Kesehatan

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target		
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan SIK secara Terintegrasi	84,5 %	1 Unit	1 Dokumen	1,000,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. Laboratorium Kesehatan	84,5 %	1,100,000,000	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							250,000,000			275,000,000	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan			1 Unit		250,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				275,000,000
TOTAL										23,769,073,020				14,688,342,013		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT. Pelatihan Kesehatan

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Target Capaian Kinerja									
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target							
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																		
1	02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
1	02	01	1.02	01	1.02	02										280,929,000					
1	02	01	1.06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										345,323,212				
1	02	01	1.06	01	1.06	01	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49,782,193	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	69,384,912			
1	02	01	1.06	02		Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61,215,390		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0			
1	02	01	1.06	03		Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140,544,510		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0			
1	02	01	1.06	05		Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Paket	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57,729,000		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	63,501,900			
1	02	01	1.06	06		Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17,220,000		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	18,942,000			
1	02	01	1.06	09		Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Umum yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175,904,000		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	193,494,400			
1	02	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												6,106,017,386			5,063,480,886
1	02	01	1.07	05		Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	1 Paket	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,037,460,874		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	2,655,059,486			
1	02	01	1.07	06		Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	16 Unit	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105,926,000		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	116,518,600			
1	02	01	1.07	09		Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	3 Unit	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,282,000,000		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,489,785,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT. Pelatihan Kesehatan

Kode			Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	722 Unit	1 Dokumen	1,807,816,106	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	0
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah dokumen layanan administrasi barang milik daerah	100 %	78 Unit	1 Dokumen	872,814,406	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	802,117,800
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							960,058,399			1,056,000,000	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	1,000,000
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	770,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang Berkualitas	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	259,058,399	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	285,000,000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							10,093,670,066			11,084,149,073	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	33,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	33,470,000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	3 Unit	1 Dokumen	100,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100,410,000
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	33,000,000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	86,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	89,870,000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	9,158,580,066	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	10,074,438,073

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT. Pelatihan Kesehatan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	38,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	42,790,000
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	100 %	1 Unit	1 Dokumen	645,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	710,171,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											8,454,353,435
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											8,454,353,435
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang dilatih pada pelatihan Kesehatan Terakreditasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Jumlah dokumen hasil peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDMK yang berkualitas	3 %	1460 Orang	1 Dokumen	7,019,469,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Tenaga Kesehatan yang dilatih pada pelatihan Kesehatan Terakreditasi	3 %	8,454,353,435
TOTAL												24,937,000,144				26,284,235,606



Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Jl. Prof. HM. Yamin SH No. 41 AA, Medan.